



**PEMKAB
TASIKMALAYA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH T.A 2024

**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**



Kabupaten Tasikmalaya

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V (0265) 543504

Fax. (0265) 543505 Kode Pos 46415

S I N G A P A R N A

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id

email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504, Fax (0265) 543505
Website: bpkpd.tasikmalayakab.go.id; email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id
Singaparna – 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 000.8.6.3/KEP.13/BPKPD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2024, tentang Perubahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
31. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504, Fax (0265) 543505
Website: bpkpd.tasikmalayakab.go.id; email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id
Singaparna – 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 000.8.6.3/KEP.09/BPKPD/2025
LAMPIRAN : 2 (dua) lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2024, tentang Perubahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
31. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKPD Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,**



Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.8.6.3/KEP.09/BPKPD/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Tahun 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
TAHUN 2024

KETUA : **Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M**
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

WAKIL KETUA : **ARIF YUANA HAKIM, S.E.**
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SEKRETARIS : **SHORRICHUDDHUHA, S.Sos**
Perencana Ahli Muda

ANGGOTA : 1. **Verawati, SE**
Perencana Ahli Pertama
2. **Muthya Fuji Pratama, SE**
Perencana Ahli Pertama
3. **Rusy Laytifah Munggaran, SE**
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. **Taufik Gunawan, S.Sos**
Pengelola Bahan Perencanaan

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M

NIP. 19681008 198803 1 003

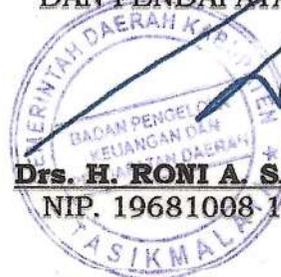
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.8.6.3/KEP.09/BPKPD/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Tahun 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) TAHUN 2024

- KETUA** : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- WAKIL KETUA** : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.
- SEKRETARIS** : - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
- Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.
- ANGGOTA** : - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu.

LKIP berfungsi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BPKPD Kabupaten Tasikmalaya baik selaku Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Keberhasilan capaian kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya merupakan upaya dari semua unsur BPKPD dan *Strakeholder* terkait.

LKIP BPKD Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan berpedoman pada sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP BPKPD Tahun 2024 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami menerima saran serta masukan agar kinerja kami semakin baik. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, 24 Januari 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
1 BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	1-3
1.2 Struktur Organisasi.....	1-6
1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	1-9
1.4 Isu Aktual.....	1-12
1.5 Sistematika LKIP	1-15
2 BAB II PERENCANAAN KERJA	2-1
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	2-1
2.2 Tujuan	2-2
2.3 Sasaran	2-2
2.4 Indikator Kinerja Utama	2-4
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	2-8
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	2-9
3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	3-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	3-4
3.1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	3-12
3.1.2 Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....	3-24
3.1.3 Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.....	3-38
3.1.4 Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.....	3-49
3.2 Realisasi Anggaran.....	3-60
4 BAB IV PENUTUP	4-1
5 LAMPIRAN	5-1

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana.....	1-10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah BPKPD Tahun 2021-2026.....	2-4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Tahun 2024 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026).....	2-5
Tabel 2.3	Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)	2-8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024	2-10
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2024	2-11
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja 1.....	3-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja 2.....	3-2
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2024 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026).....	3-3
Tabel 3.4	Hasil Penilaian IPKD Tahun 2024	3-6
Tabel 3.5	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2024	3-15
Tabel 3.6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024	3-19
Tabel 3.7	Capaian Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021-2024	3-27
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2024	3-31

Tabel 3.9	Capaian Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	3-44
Tabel 3.10	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	3-47
Tabel 3.11	Capaian Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3-51
Tabel 3.12	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Pertumbuhan Pajak Daerah	3-57
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024	3-62

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi.....	1-5
Gambar 3.1	Indikator Tujuan IPKD	3-4
Gambar 3.2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	3-12
Gambar 3.3	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.....	3-24
Gambar 3.4	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	3-38
Gambar 3.5	Pertumbuhan Pajak Daerah	3-49

DAFTAR GRAFIK



Grafik 1.1	Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan	1-9
Grafik 3.1	Perbandingan capaian Tahun 2024 Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-16
Grafik 3.2	Perbandingan capaian Tahun 2024 Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-27
Grafik 3.3	Perbandingan capaian Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-44
Grafik 3.4	Pertumbuhan Pajak Daerah	3-51
Grafik 3.5	Perbandingan capaian Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-52



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

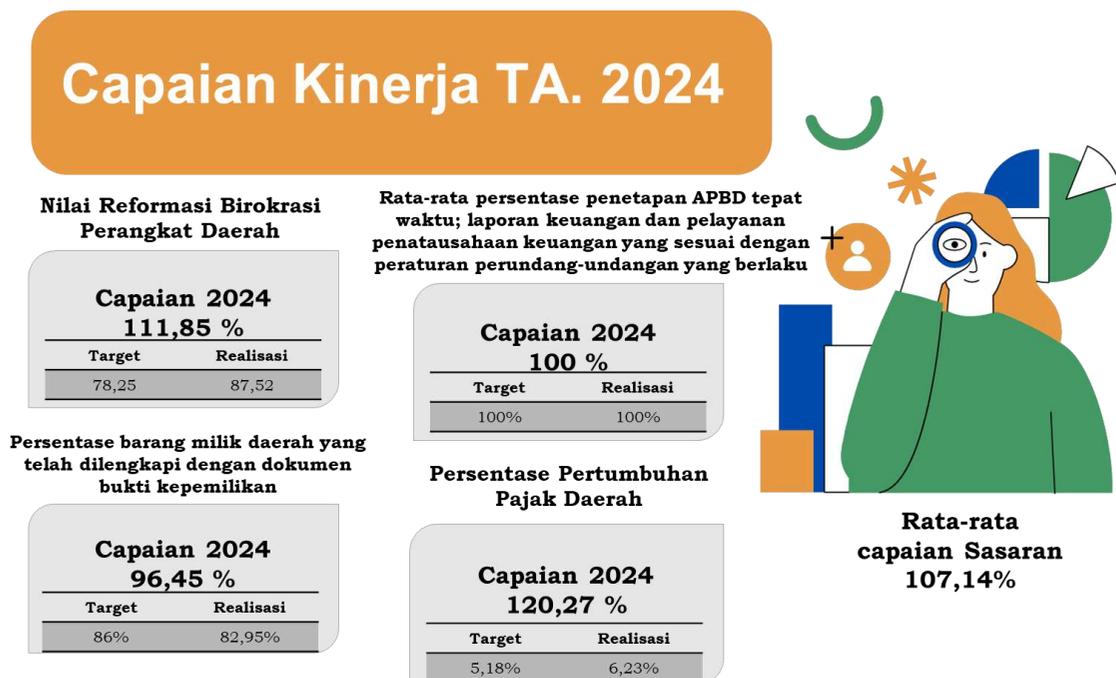
Penyusunan LKIP juga berfungsi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mendukung Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya melalui pencapaian sasaran 6 yaitu **Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah** dengan indikator sasaran **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**. Untuk mendukung pencapaian tersebut maka di turunkan menjadi Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “**Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima**”.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026, sasaran strategis BPKPD terdiri dari 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel;
 - Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan.
4. Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah.
 - Persentase pertumbuhan pajak daerah.

Gambar I.1
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2024



*Sumber: BPKPD TA 2024 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 8 Januari 2025

Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dari 4 indikator tersebut terdapat 2

(dua) indikator dengan hasil realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 111,85% dan Persentase pertumbuhan pajak daerah dengan capaian kinerja 120,27%. Indikator yang sesuai target dengan capaian 100% yaitu Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan untuk indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu ditargetkan tercapai 86% namun terealisasi 82,95%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 pensertipikatan tanah/bangunan milik daerah berfokus pada pensertipikatan ruas jalan dan terdapat perubahan data mengenai tanah/bangunan milik pemerintah daerah dari hasil temuan BPK RI, hibah dan belanja modal serta terdapat 346 unit kendaraan yang dihibahkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sehingga mempengaruhi kepada persentase perhitungan BMD yang telah memiliki bukti kepemilikan.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai upaya, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan dan program untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pada Tahun 2024 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 737.703.200.417,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp. 22.836.075.321,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp. 698.321.517.548,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 16.540.969.025,00.

Realisasi anggaran BPKPD pada tahun 2024 sangat baik yaitu mencapai 98,66% atau sebesar Rp. 727.206.598.943,00 dengan persentase *output* sebesar 101,25%. Terdapat 59 (Lima puluh sembilan) sub kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dengan *output* 100%, sedangkan terdapat 1 Sub Kegiatan yang tercapai 175% yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan

Bidang Anggaran dimana ditargetkan 4 dokumen dan terealisasi 7 dokumen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

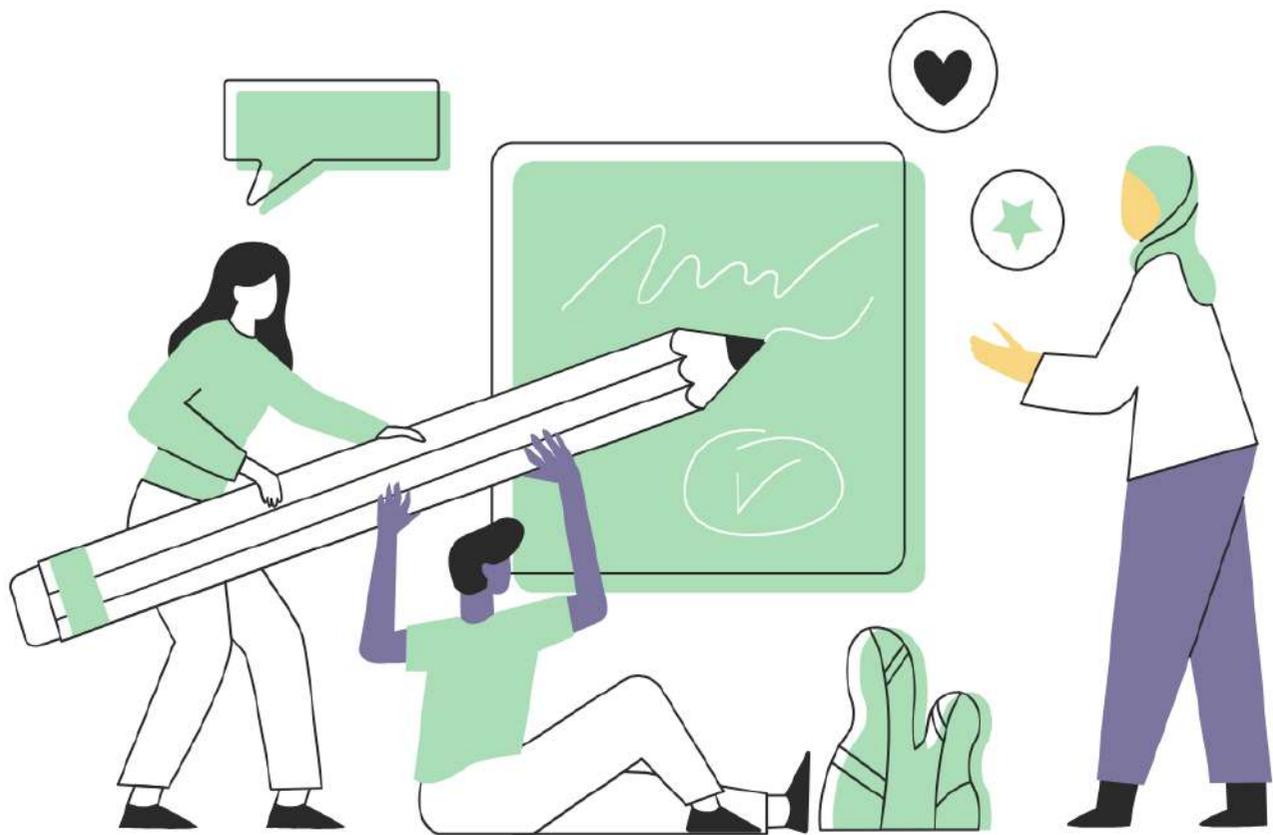
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
				Target	Realisasi	Capaian %				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	78,25	87,52	111,85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.242.098.246	28.345.187.797	93,73
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	701.350.456.448	693.603.902.309	98,90
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	86	82,95	96,45	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.852.100	955.508.449	99,86
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,18	6,23	120,27	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.525.061.000	4.302.000.388	95,07
Total								737.074.467.794	727.206.598.943	98,66

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 8 Januari 2025



**PEMKAB
TASIKMALAYA**

BAB I PENDAHULUAN



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu entitas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi Bupati Tasikmalaya dan tujuan sasaran sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja suatu organisasi, dalam hal ini adalah BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari setiap pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Tasikmalaya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah

terinci dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. BPKPD melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional**, dengan tujuan daerah yaitu **meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik** serta sasaran daerah **meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah**. Untuk dapat mewujudkan misi tersebut maka arah kebijakan yang dilakukan oleh BPKPD berdasarkan dokumen RPJMD yaitu Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan pelayanan dasar, Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada tujuan dan sasaran diatas, maka BPKPD berupaya melakukan kinerja dengan optimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta meningkatkan kualitas pencapaian kinerja dari tahun sebelumnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKPD pada Tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Melaksanakan optimalisasi terhadap proses penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan koordinasi secara intens kepada Kementerian Dalam Negeri terkait SIPD RI yang belum optimal;
4. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah serta percepatan terhadap pengamanan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Melakukan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta melakukan digitalisasi terhadap pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan

Daerah khususnya dalam pelayanan pajak dan retribusi yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan kepatuhan para wajib pajak dan wajib retribusi;

6. Melakukan pengkajian terhadap jenis-jenis pajak daerah, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah;
7. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan di lingkungan BPKPD;
8. Melakukan inovasi sebagai upaya dalam peningkatan pajak daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Dengan tersusunnya laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan, maka akan terbentuk sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* yang diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) adalah unit kerja di bawah pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan Pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai aspek keuangan daerah termasuk pajak,

retribusi, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan kekayaan daerah. Selain itu, mengatur pula tentang penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD, laporan keuangan, pertanggungjawaban APBD, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah aspek yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dalam konteks ini, BPKPD memegang peran yang strategis. Peran ini mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, tugas dan fungsi BPKPD sangatlah krusial dalam menjaga integritas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah, sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah terinci dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;
- b. Penyelenggaraan perumusan, penerapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset daerah;
- c. Penyelenggaran kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset daerah;
- d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rancangan pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan anggaran/prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- f. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan aset daerah;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- j. Penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lainnya.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Badan;
- b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. menyelenggarakan penyusunan anggaran;
- e. menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan anggaran atau prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- f. menyelenggarakan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan;

- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis investasi dan aset daerah;
- h. menyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro;
- i. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis mengenai pinjaman daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi, penyusunan anggaran dan pelaporan dana transfer ke kas daerah;
- k. menyelenggarakan fungsi BUD;
- l. menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- n. menyelenggarakan pembinaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
- o. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi pendapatan daerah dengan instansi terkait dan perangkat daerah lain pengelola pendapatan daerah;
- q. menyelenggarakan pembinaan terhadap perangkat daerah lain pengelola pendapatan daerah; dan
- r. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

1.2 Struktur Organisasi

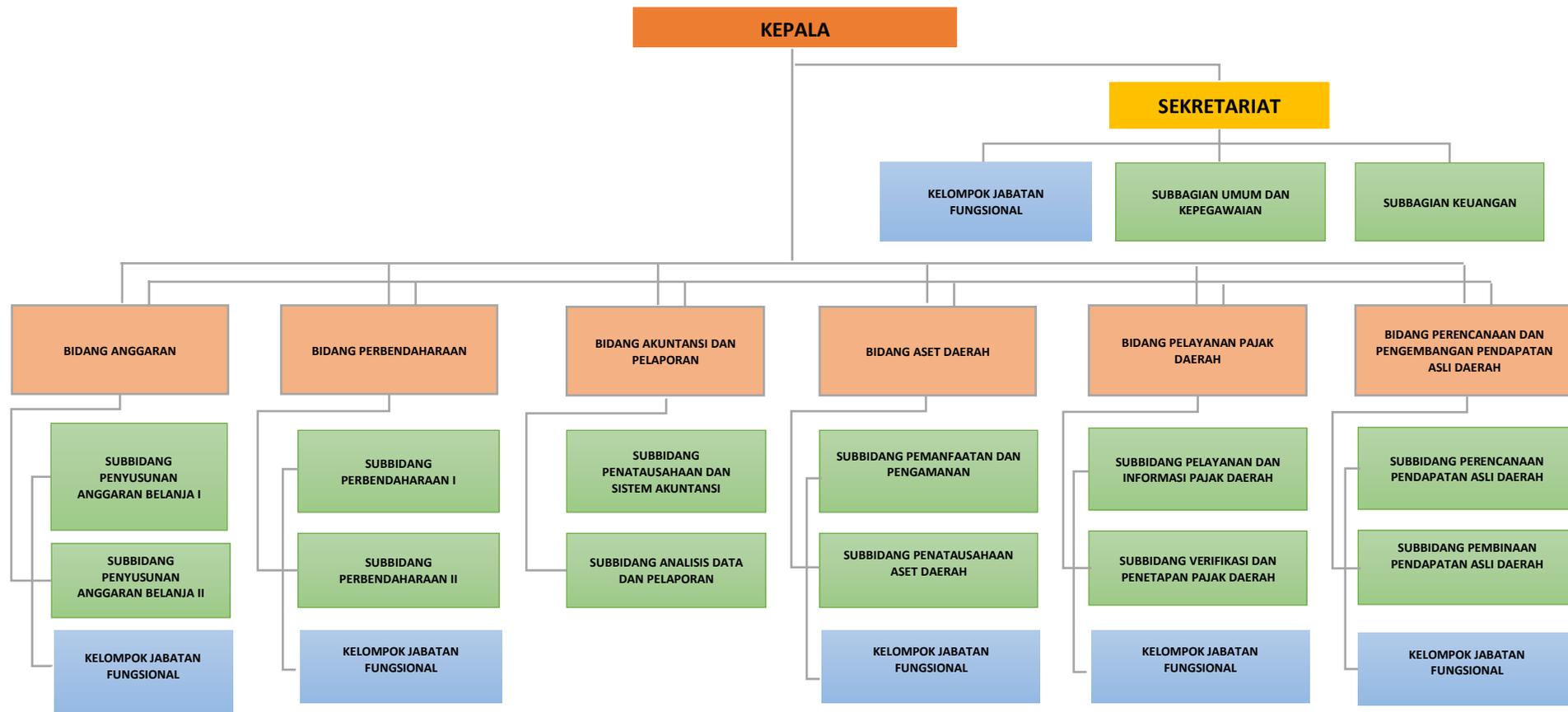
Struktur Organisasi BPKPD menurut Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 - 2) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Untuk lebih jelasnya mengenai bagan struktur organisasi BPKPD dapat dilihat dalam Gambar 1.1. sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Menurut Perbup No. 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
 Fungsi Perangkat Daerah

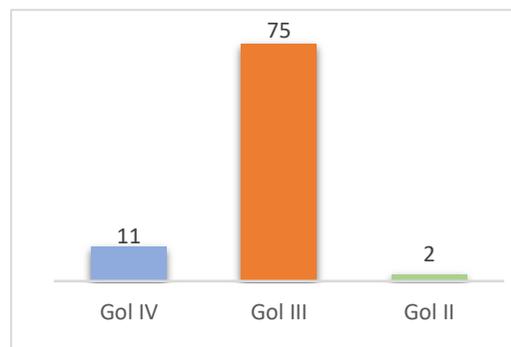


1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

A. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), BPKPD dibantu oleh sumber daya manusia yang terampil dan tepat di bidangnya secara substansi. Sampai akhir Tahun 2024, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai PNS sebanyak 88 orang yang terdiri dari 21 orang Jabatan Struktural, 58 orang Jabatan Fungsional Umum, 9 orang Jabatan Fungsional tertentu serta terdapat PPPK sebanyak 7 orang. Rincian sebaran pegawai di lingkungan BPKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Grafik 1.1
Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan



Data Pegawai

39 Orang



56 Orang

B. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

NO	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.661	Unit/Buah	Baik
1	ALAT BESAR	2	Unit	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Unit	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
2	KOMPUTER	577		Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Buah	Baik
	- Mini Komputer	3	Buah	Baik
	- Internet	1	Buah	Baik
	- P.C Unit	124	Buah	Baik
	- Laptop	109	Buah	Baik
	- Note Book	48	Buah	Baik
	- Tablet PC	18	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Baik
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	139	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	24	Buah	Baik
	- Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah	Baik
	- Server	14	Buah	Baik
	- Router	1	Buah	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	76	Buah	Baik
3	ALAT ANGKUTAN	87	Unit	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	Unit	Baik
	- Pick Up	1	Unit	Baik
	- Sepeda Motor	75	Unit	Baik
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29	Unit	Baik
	- Rol Meter	3	Unit	Baik
	- Global Positioning System	26	Unit	Baik
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	908	Buah	Baik
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	26	Buah	Baik
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Buah	Baik
	- Mesin Kas Register	6	Buah	Baik
	- Lemari Besi/Metal	25	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	8	Buah	Baik

- Rak Besi	48	Buah	Baik
- Rak Kayu	1	Buah	Baik
- Filing Cabinet Besi	73	Buah	Baik
- Brandkas	2	Buah	Baik
- Papan Visual/Papan Nama	294	Buah	Baik
- Alat Penghancur Kertas	6	Buah	Baik
- Mesin Absensi	12	Buah	Baik
- Alat Kantor Lainnya	7	Buah	Baik
- Meja Kerja Kayu	3	Buah	Baik
- Sice	1	Buah	Baik
- Meja Rapat	19	Buah	Baik
- Meja Resepsionis	2	Buah	Baik
- Meja 1/2 Biro	62	Buah	Baik
- Kursi Rapat	58	Buah	Baik
- Kursi Tamu	1	Buah	Baik
- Kursi Putar	2	Buah	Baik
- Bangku Tunggu	21	Buah	Baik
- Meja Komputer	2	Buah	Baik
- Sofa	11	Buah	Baik
- Meubeleur lainnya	1	Buah	Baik
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	Baik
- Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
- A.C. Window	36	Buah	Baik
- A.C. Split	3	Buah	Baik
- Televisi	3	Buah	Baik
- Unit Power Supply	9	Buah	Baik
- Camera Video	4	Buah	Baik
- Tustel	8	Buah	Baik
- Dispenser	2	Buah	Baik
- Handy Cam	2	Buah	Baik
- Karpet	1	Buah	Baik
- Gordyin/Kray	5	Buah	Baik
- Alat Pemanas Ruangan	1	Buah	Baik
- DVD Player	1	Buah	Baik
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	Buah	Baik
- Alat Pemadam/Portable	3	Buah	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	Buah	Baik
- Meja Kerja Pejabat lain-lain	36	Buah	Baik
- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
- Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Buah	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik

	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	Buah	Baik
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	17	Buah	Baik
	- Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Buah	Baik
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	Buah	Baik
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	57	Buah	Baik
	- Audio Amplifier	2	Buah	Baik
	- Intercom Unit	4	Buah	Baik
	- Audio Command Desk	5	Buah	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	- Camera Electronic	8	Buah	Baik
	- Tripod Camera	1	Buah	Baik
	- Slide Projector	1	Buah	Baik
	- Lensa Kamera	1	Buah	Baik
	- Layar Film/Projector	15	Buah	Baik
	- Mesin Cetak Elektronik	1	Buah	Baik
	- Mesin Kertas	12	Buah	Baik
	- Telephone (PABX)	1	Buah	Baik
	- Handy Talky (HT)	2	Buah	Baik
	- Facsimile	1	Buah	Baik
	- Drone	1	Buah	Baik
	- alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Buah	Baik
7	ALAT LABORATORIUM	1	Buah	Baik
	- alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Buah	Baik

*Sumber: BPKPD TA 2024 (diolah)

1.4 Isu Aktual

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang

signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi sistem berbasis elektronik pada pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah belum dapat berjalan secara optimal;
2. Terbitnya kebijakan baru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi tantangan dalam penyusunan APBD;
3. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan BMD Kabupaten Tasikmalaya dan masih terdapat 225 bidang tanah yang belum tersertifikasi, hal tersebut dikarenakan terdapat aset tanah/bangunan yang belum *clear and clean* serta kesulitan dalam penyediaan kelengkapan dokumen untuk proses pensertifikatan;
4. Belum optimalnya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5. Pada Tahun 2024 dengan mulai berlakunya implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diturunkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diperkirakan akan berdampak terhadap penurunan PAD karena berdasarkan peraturan tersebut terdapat tarif pajak yang mengalami penurunan,

diantarnya tarif pajak parkir yang semula 30% menjadi 10%, tarif pajak hiburan dari 25% menjadi 10% dan juga pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang sebelumnya ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 menjadi Rp. 80.000.000,00 dengan tarif 5%;

6. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya;
7. Belum optimalnya penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang digunakan untuk pembanguann Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh BPKPD dalam menangani isu strategis pada Tahun 2024 diantaranya :

1. Melakukan koordinasi secara intes dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, serta melakukan koordinasi terkait perpindahan dari SIMDA BMD ke e-BMD;
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyusunan APBD serta melakukan penyusunan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan percepatan pensertipikatan terhadap tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2024 berfokus kepada 2 ruas jalan, 1 tanah pemakaman dan 3 tanah bangunan sekolah;
4. Melakukan kajian potensi Pajak Daerah dan kajian potensi Reklame, yang diharapkan dapat memberikan gambaran besaran pajak daerah dan reklame yang dapat diterima serta memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah;
5. Melakukan pemuktahiran data pajak daerah melalui pendataan dan pendaftaran terhadap objek pajak daerah;

6. Melakukan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta turunannya berupa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
7. Melakukan pengembangan Aplikasi Pajak Daerah *Online* serta pembangunan Elektronik Retribusi Kabupaten Tasikmalaya, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengelola pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan penerimaan daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di lingkungan BPKPD.

1.5 Sistematika LKIP

Sistematika Penyajian LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi;
- B. Struktur Organisasi;
- C. Aspek Kepegawaian;
- D. Isu Aktual;
- E. Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



**PEMKAB
TASIKMALAYA**

BAB II

PERENCANAAN KERJA



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (Lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat mencapai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab perangkat daerah melalui rancangan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan khususnya Bidang Keuangan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum pada misi kedua yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Sedangkan tujuan jangka menengah yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut sasaran dan indikator

sasaran dari tujuan-tujuan strategis BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RENSTRA 2021-2026:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Untuk lebih jelasnya target sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	78,25	78,50	79	79
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	89	90	90
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30	5,30

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

2.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPKPD berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2024
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. 	<p>Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.</p> <p>1. Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.</p> <p>a. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari: i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; - Data kepegawaian; - SOP; - IKM; - Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; - SK Kepala Badan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
					<p>b. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator.</p> <p>2. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.</p>	
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lambat 31 Desember - (dokumen pelaporan yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/(dokumen pelaporan yang harus diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)x 100%) - (dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan/dokumen realisasi belanja yang diterbitkan x 100%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Perda APBD - Dokumen laporan keuangan - Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
				Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah dan kendaraan yang dimiliki dibagi jumlah sertifikat dan BPKB	Hasil penilaian pengelolaan BMD
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	$((\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) / (\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) \times 100\%)$	LRA tahun n dan (n-1)

Sumber: IKU BPKPD Tahun 2021-2026 (revisi Tahun 2024)

2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan secara tahunan.

Tabel 2.3
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	78,25
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	86
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,18

Sumber: Perubahan Renja BPKPD Tahun 2024

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Tahun 2024 dan DPA BPKPD Tahun 2024. Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 mengacu pada RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan DPPA BPKPD Tahun 2024. Berikut adalah perjanjian kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,25
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,11%

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

Anggaran Belanja Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
			(Rp.)	
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30.242.098.246,00	4,10
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	701.350.456.448,00	95,15
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	956.852.100,00	0,13
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	4.525.061.000,00	0,61
TOTAL			737.074.467.794,00	100

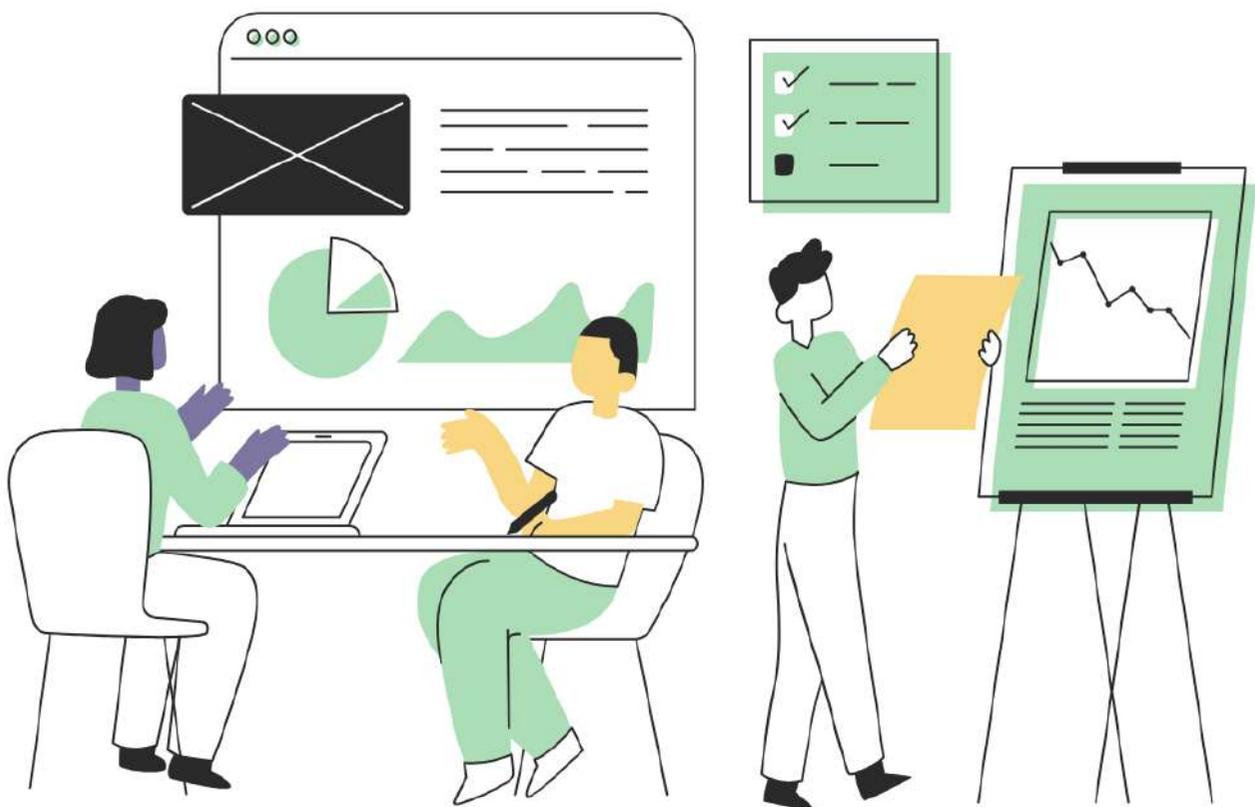
Sumber: BPKPD TA. 2024 (diolah)



**PEMKAB
TASIKMALAYA**

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah dan Visi Misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis BPKPD tahun 2021-2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, serta Perjanjian Kinerja dan Perubahan Kinerja Tahun 2024.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja 1

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja 2

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja	Penilaian	Kode Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi		
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi		
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang		
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah		
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah		

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, BPKPD menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran yang didukung oleh 4 program, 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan, dengan anggaran total sebesar Rp. 737.074.467.794,00 dan terealisasi sebesar 98,66% atau sebesar Rp. 727.206.598.943,00 maka persentase tingkat efisiensi anggaran yaitu 1,34%. Berikut pengukuran Kinerja dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026:

Tabel 3.3

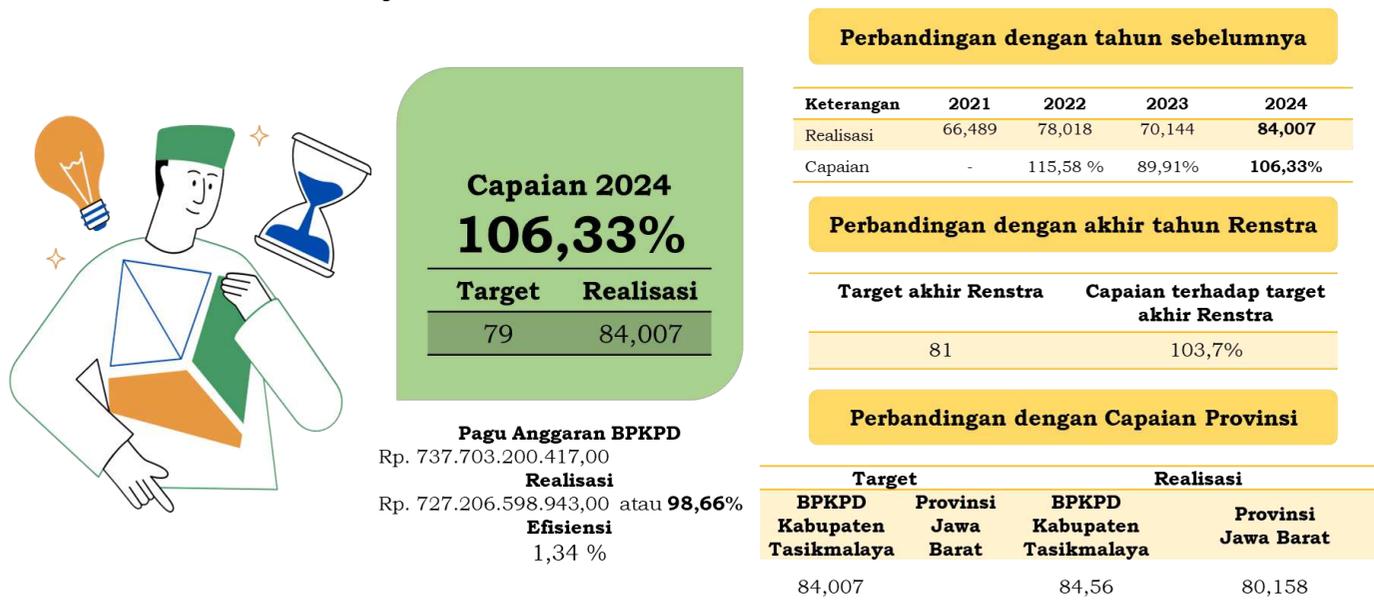
**Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2024
(berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021 – 2026)**

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1:					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
1.1	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	78,25	87,52	111,85
Rata Rata Pencapaian Sasaran					111,85
Sasaran Strategis 2:					
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel					
2.1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100
Sasaran Strategis 3:					
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel					
3.1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	86	82,95	96,45
Rata Rata Pencapaian Sasaran					96,45
Sasaran Strategis 4:					
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah					
4.1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	5,18	6,23	120,27
Rata Rata Pencapaian Sasaran					120,27
Rata Rata Pencapaian Per Sasaran					107,14

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 8 Januari 2025

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Rata-rata capaian kinerja BPKPD Tahun 2024 menunjukkan capaian yang baik dengan persentase sebesar 107,14%. Selain capaian kinerja sasaran, BPKPD juga melakukan pengukuran capaian terhadap tujuan BPKPD. Berikut capaian Kinerja Indikator Tujuan BPKPD Tahun 2024 :



Gambar 3.1
Indikator Tujuan
IPKD

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui badan penelitian dan pengembangan daerah Provinsi melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memacu dan memotivasi Pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran IPKD dilakukan

terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Pengelompokan hasil IPKD dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Penilaian IPKD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat 6 dimensi yang dinilai dalam IPKD dengan bobot yang berbeda. Dimensi yang dinilai diantaranya : a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot maksimal 15, b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot maksimal 20, c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot maksimal 15, d. Dimensi penyerapan anggaran dengan bobot maksimal 20, e. Kondisi Keuangan Daerah bobot maksimal 15 dan f. Opini BPK atas LKPD bobot maksimal 15.

Pengukuran IPKD yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2023. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai A dengan indeks total sebesar 84,007 predikat “Baik”. Kabupaten Tasikmalaya merupakan peringkat ke-10 dari tingkat Kabupaten seluruh Indonesia dengan kemampuan keuangan daerah klaster rendah. Nilai IPKD Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apabila dibandingkan dengan target sebesar 79 maka memperoleh capaian kinerja sebesar 106,33%. Meskipun telah melampaui target yang telah ditetapkan, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil

penilaian IPKD yang diperoleh pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Penilaian IPKD Tahun 2024
(atas Laporan Keuangan Tahun 2023)

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
1	D.1.1	Kesesuaian Nomenkelatur Program RPJMD dan RKPD	1	Dalam laporan tahun 2023 terdapat 420 program dimana 418 program berstatus sesuai dan 2 program berstatus tidak sesuai. Maka 99,5% telah sesuai dan 0,05% tidak sesuai
	D.1.2	Kesesuaian Nomenkelatur Program RKPD dan KUAPPAS	0,97	Dalam laporan tahun 2023 terdapat 426 program dimana 414 program berstatus sesuai dan 12 program berstatus tidak sesuai. Maka 97,2% telah sesuai dan 2,8% tidak sesuai
	D.1.3	Kesesuaian Nomenkelatur Program KUAPPAS dan APBD	1	Dalam laporan tahun 2023 terdapat 423 program dimana 421 program berstatus sesuai dan 2 program berstatus tidak sesuai. Maka 99,5% telah sesuai dan 0,05% tidak sesuai
	D.1.4	Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUAPPAS	0,62	Dalam laporan tahun 2023 terdapat 426 program dimana 262 program berstatus sesuai dan 164 program berstatus tidak sesuai. Maka 61,5% telah sesuai dan 38,5% tidak sesuai
	D.1.5	Kesesuaian Pagu Program KUAPPAS dan APBD	0,70	Dalam laporan tahun 2023 terdapat 423 program dimana 295 program berstatus sesuai dan 128 program berstatus tidak sesuai. Maka 69,7 % telah sesuai dan 30,3% tidak sesuai
Total Nilai Dimensi 1 (skor rata-rata x nilai maksimal)			12,82	Nilai Maksimal 15
2	D.2.1	Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1,00	Belanja untuk fungsi pendidikan telah dialokasikan sebesar 38,35% dari APBD
	D.2.2	Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1,00	Belanja untuk urusan kesehatan telah dialokasikan sebesar 20,10% dari APBD di luar gaji
	D.2.3	Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	1,00	Belanja untuk Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar 41,67%
	D.2.4	Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal	0,96	Terdapat 1 SPM yang tidak dialokasikan pada tahun 2023 Pelayanan informasi rawan bencana
Total Nilai Dimensi 2 (skor rata-rata x nilai maksimal)			19,83	Nilai Maksimal 20
3	D.3.1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
	D.3.2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	0,50	Dokumen telah di upload dengan tidak tepat waktu (359 hari setelah ditetapkan) dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.9	Informasi Ringkasan DPA SKPD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.10	Informasi DPA PPKD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.12	Informasi Realisasi Belanja Daerah	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.15	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.16	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.17	Informasi Ringkasan RKA Perubahan	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.18	Informasi Umum Pengadaan	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
	D.3.19	Informasi SK Kepala Daerah tentangn Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.21	Informasi Laporan Arus Kas	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.22	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.24	Informasi Neraca	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.25	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	0,50	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.27	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.28	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.29	Informasi Opini BPK	1,00	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
Total Nilai Dimensi 3 (skor rata-rata x nilai maksimal)			12,41	Nilai Maksimal 15
4	D.4.1	Penyerapan Anggaran Belanja Operasional	1,00	Penyerapan anggaran belanja operasional sebesar 93,25% dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
	D.4.2	Penyerapan Anggaran Belanja Modal	1,00	Penyerapan anggaran belanja modal sebesar 94,16% dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
	D.4.3	Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga	1,00	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga sebesar 96,25% dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
	D.4.3	Penyerapan Anggaran Belanja Transfer	1,00	Penyerapan anggaran belanja transfer sebesar 99,08% dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
Total Nilai Dimensi 4 (skor rata-rata x nilai maksimal)			20,000	Nilai Maksimal 20

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
5	D.5.1	Kemandirian Keuangan	0,1984	didapat dari total PAD dibandingkan dengan total pendapatan
	D.5.2	Fleksibilitas Keuangan	0,5573	didapat dari total pendapatan dikurangi DAK dibagi total kewajiban ditambah belanja pegawai
	D.5.3	Solvabilitas Operasional	0,1701	didapat dari total pendapatan LO dikurangi pendapatan DAK LO dibagi total beban LO
	D.5.4	Solvabilitas Jangka Pendek	0,0132	didapat dari kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek dibagi kewajiban lancar
	D.5.5	Solvabilitas Jangka Panjang	0,6229	didapat dari total aset tetap dibagi kewajiban jangka Panjang
	D.5.6	Solvabilitas Layanan	0,0146	didapat dari total aset tetap dibagi jumlah penduduk
Total Nilai Dimensi 5 (skor rata-rata x nilai maksimal)			3,9415	Nilai Maksimal 15
Dimensi 6	D.6.1	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan	15,00	Kabupaten Tasikmalaya telah memperoleh opini WTP 4 tahun terakhir seccara berturut turut sehingga mendapatkan nilai maksimal pada dimensi 6 yaitu 15 poin
Total Nilai Dimensi 6 (skor rata-rata x nilai maksimal)			15,00	Nilai Maksimal 15
Total IPKD			84,007	Kategori Baik

Capaian IPKD kabupaten Tasikmalaya Pada tahun 2024 adalah sebesar 84,007 dari target 79,00 atau 106,33 % dengan kategori baik, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan siklus keuangan daerah, adanya persamaan persepsi dan kerjasama yang baik antara Perangkat Daerah terkait (Bappelitbangda, BPKPD, Dishubkominfo dan Inspektorat Daerah), adanya motivasi dan dorongan dari Pimpinan untuk selalu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta didukung komitmen dari seluruh Perangkat Daerah untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

1. Masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran;

2. Terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak ada alokasi anggarannya yaitu pada SPM Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pada dimensi 3 diukur berdasarkan skor tepat waktu dalam melakukan upload dokumen pada website resmi Pemerintah Daerah dan kemudahan dalam keteraksesan dokumen tersebut. Dari 29 dokumen yang telah diupload terdapat 1 dokumen yang berdasarkan tim penilai tidak tepat waktu yaitu pada dokumen Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta terdapat 8 dokumen yang tidak dapat diakses;
4. Kondisi keuangan daerah yang masih rendah karena masih bergantung kepada transfer pusat dan provinsi.

Dari penjelasan diatas maka hal yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, adalah :

1. Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak terkait dalam penilaian IPKD diantaranya Bappelitbangda (dalam hal perencanaan anggaran), Dishubkominfo (dalam hal transparansi) dan Inspektorat Daerah (dalam hal opini BPK) serta Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya (dalam hal penyerapan anggaran);
2. Meningkatkan kualitas *website* Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah terkait agar dapat memberikan kemudahan dalam hal keteraksesan dokumen sehingga transparansi menjadi optimal;
3. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk *mandatory spending* dan SPM;
4. Berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan inovasi-inovasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.487-BP2D/2021 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2018 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-9 dengan indeks 58,40 (Kategori Perlu Perbaikan). Pada tahun 2019 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-7 dengan indeks 59,06 (Kategori Perlu Perbaikan). Dan untuk tahun 2020 nilai IPKD Kab. Tasikmalaya 66,489 (Kategori Perlu Perbaikan) berada di peringkat ke-6.

Pengukuran IPKD yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2021. Nilai IPKD Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan indeks 78,018 (Kategori Baik). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.714-Bp2d/2022 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, memperoleh peringkat ke 3 dari 18 Kabupaten se Provinsi Jawa Barat. Namun pada Tahun 2023 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.36-BP2D/2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan yaitu mendapatkan nilai sebesar 70,144 (perlu perbaikan).

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka realisasi IPKD telah melampaui target dengan capaian 103,07%, sehingga harus dilakukan penyesuaian target pada dokumen rencana kinerja tahunan. Diharapkan untuk kedepannya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadi lebih baik dengan menghadapi tantangan yang semakin sulit dan peraturan yang dinamis.

3.1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



Gambar 3.2
Nilai Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih baik. Reformasi ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri dari

Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik.

RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari: i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi;
2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator.

RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada Tahun 2024 ditargetkan dapat tercapai sebesar 78,25 kategori “A” predikat Sangat Baik. Penilaian RB pada tahun 2024 menggunakan sistem

melalui link <https://surabi.jabarprov.go.id>. Penilaian tersebut dilakukan dengan *self assessment* terlebih dahulu dengan nilai 86,61 yang terdiri dari RB General 54,78 dan RB Tematik 32,03. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim evaluator Internal Kabupaten Tasikmalaya dan tim evaluator Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil akhir, BPKPD memperoleh nilai sebesar 87,52 dengan rincian RB General 55,62 dan RB Tematik 31,89. Hasil akhir tersebut telah melebihi target dan penilaian *self assessment* yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2024 RB BPKPD terealisasi dengan nilai 87,52 kategori "A" predikat Sangat Baik sehingga mencapai kinerja sebesar 111,85% dari target 78,25. Nilai tersebut menjadikan BPKPD sebagai peringkat ke-3 (tiga) yang memperoleh nilai RB tertinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Nilai RB yang diperoleh oleh BPKPD pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 tidak ditargetkan, pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian oleh instansi terkait yang berwenang, hal ini disebabkan belum siapnya aturan pendukung untuk menilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian RB Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Mulai dilakukan pada tahun 2022 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Penilaian RB dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen dari Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim Penilai Internal dan tim Independen, Nilai RB BPKPD pada tahun 2022 terealisasi sebesar 61,36 "cukup baik" namun berdasarkan capaian kinerja hanya tercapai 94,4% dari target yang telah ditetapkan dengan nilai 65. Untuk penilaian RB Tahun 2023 Terdapat perubahan aturan yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kemudian dirubah oleh pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada Tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai sebesar 69. Berdasarkan Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Assesor Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat nilai RB BPKPD Tahun 2023 adalah 78,07 Dengan Kategori Baik. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu memperoleh nilai sebesar 87,52% dengan capaian kinerja 111,85% jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dari semua pihak di lingkungan BPKPD untuk dapat meningkatkan implementasi reformasi birokrasi khususnya pada aspek Indikator capaian sasaran strategis (nilai SAKIP, IKU, Indeks tata kelola PBJ Perangkat Daerah), Indikator pelaksanaan kebijakan RB (tingkat digitalisasi arsip) serta penigkatakan yang cukup signifikan pada RB tematik.

Tabel 3.5
Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Tahun 2021-2024

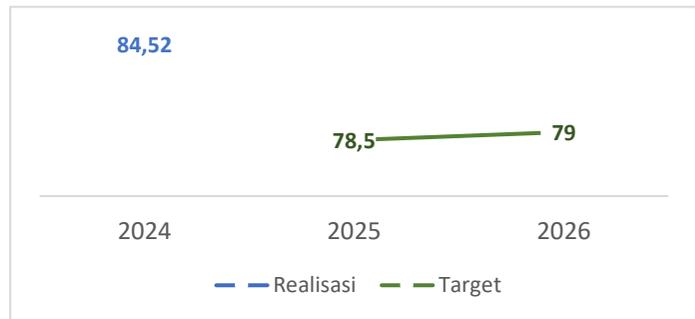
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Keterangan	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Target	N/A	65,00	69,00	78,25
		Realisasi	N/A	61,36	78,07	87,52
		Capaian Kinerja	N/A	94,40%	113,14%	111,85%

Sumber : BPKPD Tahun 2024 (diolah)

Pada akhir Renstra tahun 2026 Nilai Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 79, sehingga apabila target akhir renstra dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 87,52 maka telah mencapai kinerja sebesar 110,78%. Dikarenakan

target tersebut telah melampaui target akhir renstra, maka untuk target tahun 2025 dan selanjutnya harus dilakukan penyesuaian, hal tersebut sesuai dengan prinsip IKU yaitu SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded and Continuously Improved*).

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian
Tahun 2024 Indikator
Kinerja **Nilai Reformasi
Birokrasi Perangkat
Daerah** dengan target
pada Periode Renstra
2021-2026



Secara fungsi BPKPD berada dibawah Kementerian Keuangan RI sehingga melakukan pembandingan nilai reformasi birokrasi BPKPD dengan Kementerian Keuangan RI, untuk realisasi RB BPKPD pada Tahun 2024 sebesar 87,52 sedangkan realisasi RB Kementerian Keuangan RI pada tahun 2023 sebesar 93,3 dari target Kementerian Keuangan 85, hal tersebut menunjukkan bahwa RB di BPKPD masih dibawah standar kementerian keuangan sehingga perlu upaya ekstra agar dapat mengimbangi capaian kementerian keuangan.

Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Assesor Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat yaitu 87,52. Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja nilai reformasi birokrasi tersebut antar lain:

1. Adanya dorongan dari pimpinan yang selalu memberikan motivasi serta arah kebijakan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di BPKPD;
2. Adanya komitmen dari seluruh pegawai BPKPD untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. BPKPD terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik;

4. BPKPD telah melaksanakan bimbingan teknik mengenai Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai agar dapat memberikan pemahaman bahwa RB merupakan tanggungjawab seluruh pegawai di lingkungan BPKPD;
5. BPKPD berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BPKPD;
6. BPKPD telah melaksanakan program/kegiatan yang berdampak langsung kepada capaian sasaran Perangkat Daerah;
7. Meningkatkan pelaksanaan tata laksana di lingkungan BPKPD.

Upaya kedepan yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akutabilitas kinerja Perangkat Daerah, antara lain :

1. Mengkaji kembali kertas kerja penilaian Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan instrumen apa saja yang dapat ditingkatkan dan berupaya untuk memenuhi semua aspek yang disyaratkan dalam penilaian RB;
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam ke seluruh pegawai BPKPD, agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan RB di lingkungan BPKPD;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penilaian Reformasi Birokrasi;
4. Melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
5. Mengoptimalkan peran BPKPD dalam RB tematik;
6. Melakukan reviu kembali terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan agar lebih menasar pada penyelesaian permasalahan utama tata kelola dan lebih kolaboratif dalam pelaksanaannya.

Ketercapaian indikator sasaran tersebut didukung sumber daya anggaran, yang dijabarkan dalam 1 program 7 kegiatan serta 22 sub kegiatan. Pagu anggaran yang mendukung sasaran tersebut pada tahun 2024 yaitu Rp. 30.242.098.246,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 28.345.187.797,00 atau 93,73% sehingga terdapat efisiensi terhadap sumber daya sebesar 6,27%. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu.

Tabel 3.6
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% Efisiensi	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.242.098.246	28.345.187.797	93,73	6,27	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah	(1) 82 (2) 86,80	(1) 82 (2) 86,81	100,00	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan beberapa komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi SAKIP BPKPD mendapatkan nilai sebesar 82 dengan kategori "A" interpretasi Memuaskan. Nilai yang diraih telah mencapai target sehingga capaian kinerja yang didapat yaitu 100%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dari survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPKPD. IKM diukur dengan membandingkan harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan. IKM BPKPD tahun 2024 telah terealisasi 86,81 atau 100% Nilai SAKIP dan IKM merupakan salah satu komponen pendukung dalam evaluasi Reformasi Birokrasi, dimana apabila nilai tersebut tinggi maka hasil yang diperoleh juga akan optimal. Pagu anggaran pada program ini yaitu Rp. 30.242.098.246,00 terealisasi sebesar Rp. 28.345.187.797,00 atau 93,73 dengan tingkat efisiensi sebesar 6,27%
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.000.000	265.510.178	98,70	1,30	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101 dokumen	101 dokumen	100,00	Kegiatan ini sangat menunjang terhadap pencapaian indikator program Nilai Evaluasi SAKIP. Pada penilaian SAKIP berisikan pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Serta mendukung juga pada pencapaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Pencapaian indikator kegiatan telah mencapai target yaitu 101 dokumen yang terdiri dari 27 dokumen perencanaan dan 74 dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Pagu anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp. 269.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 265.510.178,00 atau 98,70 dengan tingkat efisiensi sebesar 1,30%

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.000.000	140.649.178	98,36	1,64	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	27 dokumen	27 dokumen	100,00	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah tersusun yaitu 27 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.000.000	124.861.000	99,10	0,90	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	74 dokumen	74 dokumen	100,00	Evaluasi dilakukan secara berkala dan telah dilaksanakan tepat waktu, dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang telah tersusun yaitu 74 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.836.075.321	21.358.189.623	93,53	6,47	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	100%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program SAKIP, karena pada sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini diantaranya yaitu penyaluran gaji dan tunjangan ASN. Pagu anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp. 22.836.075.321,00 terealisasi sebesar Rp. 21.358.189.623,00 atau 93,53 dengan tingkat efisiensi sebesar 6,47%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.836.075.321	21.358.189.623	93,53	6,47	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang	95 orang	100,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN terdiri dari Gaji dan tunjangan ASN BPKPD, BPJS, JKK, JKN, dan Insentif ASN atas Pemungutan Pajak. Gaji dan tunjangan telah disalurkan secara bertahap dan tepat waktu
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.340.000	439.326.156	98,21	1,79	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	100%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena pada sub kegiatan tersebut melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan meningkatkan kualitas aparatur BPKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pagu anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp. 447.340.000,00 terealisasi sebesar Rp. 439.326.156,00 atau 98,21 dengan tingkat efisiensi sebesar 1,79%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	84.190.000	81.940.000	97,33	2,67	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	100,00	Melakukan pengadaan pakaian batik dan pakaian olahraga. Pada bulan Juni pengadaan pakaian olahraga masih dalam proses pembuatan
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	363.150.000	357.386.156	98,41	1,59	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	142 orang	142 orang	100,00	Melaksanakan bimbingan teknik (capacity building) dan pelatihan/kursus lainnya. Capacity Building sebanyak 138 orang dan yang mengikuti pelatihan/kursus lainnya 4 orang sehingga jumlah orang yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 142 orang

IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.331.716.225	2.231.468.727	95,70	4,30	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah. Pagu anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp. 2.331.716.225,00 terealisasi sebesar Rp. 2.231.468.727,00 atau 95,70 dengan tingkat efisiensi sebesar 4,30%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.500	49.418.500	98,84	1,16	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor direalisasikan secara bertahap dan telah terealisasi sebesar 100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	640.084.800	617.700.350	96,50	3,50	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa penyediaan ATK, kertas dan cover serta bahan komputer telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,50%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.997.500	58.698.800	97,84	2,16	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Penyediaan peralatan rumah tangga dilaksanakan secara bertahap dan telah terealisasi sebesar 97,84%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.200.000	101.580.000	88,18	11,82	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Penyediaan bahan logistik kantor (makanan dan minuman rapat) dilaksanakan secara bertahap dengan total penyerapan anggaran sebesar 88,18%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	760.169.400	752.290.400	98,96	1,04	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah terealisasi sepenuhnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 752.290.400,00 atau 98,96%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	53.750.000	76,79	23,21	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara bertahap dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.750.000,00 atau 76,79%
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	180.000.000	180.000.000	100,00	0,00	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	4 Laporan	100,00	Penyediaan fasilitas kunjungan tamu telah terealisasi sebesar Rp. 180.000.000,00 atau 100,00%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.165.025	351.850.677	90,64	9,36	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan secara bertahap dan telah terealisasi sebesar 90,64% dengan disusunnya 4 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	68.100.000	66.180.000	97,18	2,82	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD telah dilaksanakan dan telah disusun 1 dokumen panatausahaan arsip dinamis
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	914.731.400	898.081.900	98,18	1,82	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan berisi pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. Pengadaan Barang Milik Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 898.081.900,00 atau 98,18% yaitu melakukan 1 paket pengadaan mebel dan 43 unit pengadaan peralatan dan mesin serta terdapat efisiensi 1,82%
1	Pengadaan Mebel	81.690.000	75.550.000	92,48	7,52	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Pengadaan Mebel untuk ruang rapat baru telah selesai dilaksanakan
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	833.041.400	822.531.900	98,74	1,26	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	43 Unit	43 Unit	100,00	pengadaan 43 unit peralatan dan mesin lainnya telah dilaksanakan dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 98,58%
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.670.500	1.525.825.131	90,25	9,75	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPKPD sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset dapat berjalan. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan target dan telah melakukan realisasi anggaran sebesar 90,25% dengan capaian kinerja 100,00% serta terdapat efisiensi 9,75%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.270.500	850.993.117	85,68	14,32	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah dilaksanakan sesuai target
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.000.000	62.000.000	98,41	1,59	(1) Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah selesai dilaksanakan sesuai target dengan output terealisasi 100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634.400.000	612.832.014	96,60	3,40	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah dilaksanakan sesuai target triwulan

VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.752.564.800	1.626.786.082	92,82	7,18	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini merupakan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang dikelola oleh BPKPD dalam rangka menunjang kegiatan di BPKPD sehingga mendukung pencapaian nilai reformasi birokrasi. Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan baik, telah terealisasi sebesar Rp. 1.626.786.082,00 dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi 7,18%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	902.230.000	784.455.822	86,95	13,05	Jumlah \ kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	70 Unit	100,00	Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dilakukan secara rutin serta pembayaran pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	460.440.000	456.965.260	99,25	0,75	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	253 unit	253 unit	100,00	Peralatan dan mesin lainnya dipelihara dengan baik agar tidak menghambat dalam pekerjaan, sampai dengan triwulan IV terdapat 253unit peralatan dan mesin lainnya yang telah dilakukan perbaikan atau pemeliharaan
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	389.894.800	385.365.000	98,84	1,16	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100,00	Pada Tahun 2024 melakukan pemeliharaan untuk 3 gedung milik BPKPD, sampai dengan triwulan IV proses pemeliharaan gedung telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 385.365.000,00

*Sumber: BPKPD TA 2024 (diolah)

3.1.2 Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Pagu Anggaran
Rp. 701.350.456.448,00
Realisasi
Rp. 693.603.902.309,00 atau **98,90%**
Efisiensi
1,10%

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Realisasi	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%

Perbandingan dengan akhir tahun Renstra

Target akhir Renstra	Capaian terhadap target akhir Renstra
100%	100%

Perbandingan dengan Capaian Nasional

Target		Realisasi	
BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Nasional	BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Nasional
100%	100%	100% (penetapan APBD tanggal 2 Desember 2024)	100% (penetapan APBN tanggal 19 September 2024)



**Mewujudkan
Pengelolaan Keuangan
yang Efektif, Efisien
dan Akuntabel**

Gambar 3.3

Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari 3 sub indikator, yaitu :

- 1) Penetapan APBD tepat waktu;
- 2) Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- 3) Pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

APBD tahun 2025 telah disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. APBD tahun 2025 telah ditetapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 58

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan telah ditetapkan Perda dan Perbup APBD tahun 2025 pada tanggal 2 Desember 2024, maka penetapan tersebut telah tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat pada 31 Desember 2024. Sehingga capaian sub indikator penetapan APBD tepat waktu adalah 100%.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyusunan, mengkoordinasikan serta menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu.

Terdapat perubahan jumlah laporan dimana sebelumnya 12 laporan bulanan 4 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi 11 laporan bulanan 3 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana laporan bulan Desember dan laporan triwulan IV ditetapkan pada bulan Januari tahun 2025, sehingga total laporannya yaitu 16 Laporan.

Dokumen pelaporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehingga capaian sub indikator laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Perhitungan realisasi belanja daerah berdasarkan jumlah dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan perundang-undangan dibagi jumlah dokumen realisasi belanja yang diterbitkan. Pada Tahun 2024, jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 84 dokumen terdiri dari dokumen belanja bantuan sosial (3 dokumen), dokumen belanja operasional lainnya dan belanja modal (3 dokumen), dokumen belanja tidak terduga (3 dokumen), dokumen belanja pegawai gaji dan tunjangan (3 dokumen), dokumen belanja hibah (3 dokumen), dokumen belanja transfer (3 dokumen), dan dokumen pembiayaan (3 dokumen), dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian sub indikator pelayanan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi indikator persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100% sesuai dengan target indikator pada tahun 2024 yaitu 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja ini konsisten setiap tahunnya dengan capaian 100% atau memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data capaian kinerja untuk indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai

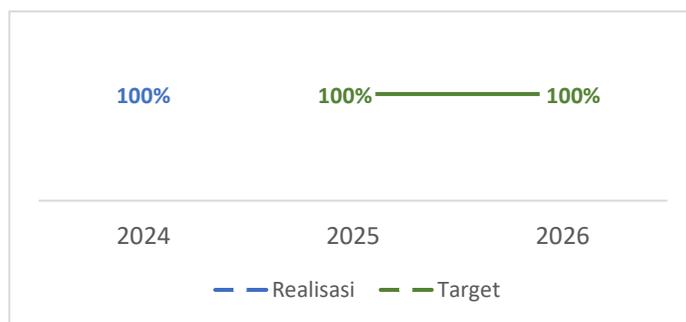
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mencapai 100% sejak tahun pertama Renstra yaitu pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Capaian indikator kinerja persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Keterangan	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Target	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	100%	100%	100%
		Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%

*Sumber: BPKPD TA 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, persentase capaian Tahun 2024 adalah 100%.



Grafik 3.2

Perbandingan capaian tahun 2024 Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026

Terdapat perbandingan capaian penyusunan APBD Tahun 2025 dengan capaian Nasional dalam hal penyusunan APBN tahun 2025. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan tepat waktu. APBD tahun 2025 telah ditetapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 2 Desember 2024. Penyusunan APBD tersebut telah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sedangkan untuk APBN sendiri telah ditetapkan tepat waktu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 19 September 2024 dan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Sehingga capaian tersebut telah mencapai 100%.

Realisasi Indikator kinerja ini pada Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Faktor pendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta *stakeholder* terkait dalam mendukung pelaksanaan APBD tahun n, penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan APBD tahun n serta dalam rangka menyusun APBD tahun n+1;
2. BPKPD berupaya untuk responsif terhadap perubahan peraturan atau kebijakan baru;
3. Melakukan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah dan BLUD di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Berupaya untuk selalu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan transparansi;
5. Adanya dorongan dari pimpinan yang selalu memberikan motivasi serta arah kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan di BPKPD;

6. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sehingga capaian indikator kinerja BPKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
7. Adanya penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dari awal perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Upaya yang kedepan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan ketercapaian pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akutabilitas kinerja Perangkat Daerah, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan terhadap Perangkat Daerah serta BLUD;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kementerian, Provinsi dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah;
4. Melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung oleh program pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program pengelolaan keuangan terdiri dari 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan pagu anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 701.350.456.448,00 dan terealisasi sebesar Rp. 693.603.902.309,00 atau 98,90% dengan tingkat efisiensi

sebesar 1,10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung oleh program pengelolaan keuangan daerah Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% EFISIENSI		OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	701.350.456.448	693.603.902.309	98,90	1,10	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	101,70%	101,70	Pada program pengelolaan keuangan daerah terdapat kegiatan untuk PPKD yaitu kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan 3 sub kegiatan. Indikator Program ini yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pagu anggaran pada program ini yaitu Rp. 701.350.456.448,00 terealisasi sebesar Rp. 693.603.902.309,00 atau 98,90 dengan tingkat efisiensi sebesar 1,10%

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% EFISIENSI		OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.415.072.000	2.387.838.983	98,87	1,13	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100,00%	106,82%	106,82	Kegiatan ini sangat mendukung pada Indikator program Persentase pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sub indikator penetapan APBD yang tepat waktu. Karena dalam output-output sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini merupakan dokumen-dokumen sebagai tahapan penyusunan APBD serta penetapan APBD. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terdiri dari 11 sub kegiatan, dimana 10 sub kegiatan telah mencapai 100% dan 1 sub kegiatan melebihi target yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan capaian 175% sehingga rata-rata capaian tersebut yaitu 106,82% Pagu anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp. 2.415.072.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.387.838.983,00 atau 98,87% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,13%
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.450.000	62.087.560	99,42	0,58	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS telah menghasilkan 1 dokumen KUA PPAS dengan realisasi anggaran Rp. 62.087.560,00 atau 99,42%.
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	62.450.000	61.581.014	98,61	1,39	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS telah menghasilkan 1 dokumen Perubahan KUA PPAS dengan realisasi anggaran Rp. 61.581.014,00 atau 98,61%.
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	60.042.000	59.738.550	99,49	0,51	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00	Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap 59 dokumen RKA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	57.450.000	54.559.975	94,97	5,03	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00	Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap 59 dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	72.500.000	70.853.988	97,73	2,27	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD telah dilaksanakan pada bulan Januari dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.853.988,00 atau 97,73% dari total anggaran.

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% EFISIENSI		OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	66.440.000	66.198.531	99,64	0,36	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00	Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD telah selesai dilaksanakan pada triwulan IV dengan total realisasi anggaran sebesar 99,64%.
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	234.200.000	231.983.618	99,05	0,95	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya perda dan perbup tentang APBD tahun 2025 pada tanggal 2 Desember 2024.
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	228.290.000	227.161.523	99,51	0,49	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya perda dan perbup tentang penjabaran perubahan APBD tahun 2024.
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	613.980.000	604.863.320	98,52	1,48	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	4 Dokumen	7 Dokumen	175,00	Sampai dengan triwulan IV dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran telah tealisasi sebanyak 6 dokumen dan melebihi target sehingga capaian kinerjanya sebesar 175%.
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	607.394.000	602.813.248	99,25	0,75	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah telah selesai dilaksanakan pada triwulan IV dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99,25%.
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	349.876.000	345.997.656	98,89	1,11	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	318 Orang	318 Orang	100,00	Telah dilaksanakannya pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten terhadap Perangkat Daerah dan BLUD dengan peserta berjumlah 318 orang.

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% EFISIENSI		OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	492.461.000	475.257.886	96,51	3,49	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan perbendaharaan daerah merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah serta belanja rutin seperti gaji dan tunjangan. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilaksanakan secara rutin, sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 475.257.886,00 atau 96,51% dengan efisiensi sebesar 3,49%.
1	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	52.050.000	51.007.500	98,00	2,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	236 Dokumen	100,00	Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD pada 59 Perangkat Daerah yang rutin dilaksanakan dan didokumentasikan per triwulan.
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	181.200.000	173.493.861	95,75	4,25	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dilaksanakan rutin setiap bulannya.
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	119.211.000	110.810.550	92,95	7,05	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan telah melakukan studi tiru ke BPKAD Kota Surakarta mengenai penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% EFISIENSI		OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	140.000.000	139.945.975	99,96	0,04	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait rutin dilaksanakan setiap bulannya
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	745.500.000	650.619.356	87,27	12,73	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena output-output sub kegiatan ini, mendukung pada pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah telah dilaksanakan dan 100% target yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Dengan penyerapan anggarannya tidak terlalu tinggi yaitu 87,27% dimana terdapat anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah yang tidak diserap sehingga terdapat efisiensi 12,73%
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	143.930.000	123.007.865	85,46	14,54	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00	Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan Perangkat Daerah telah dilaksanakan terhadap laporan keuangan bulan Januari sampai dengan Desember (untuk SKPD) serta rekon BLUD selama 4 triwulan
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	109.900.000	79.033.953	71,91	28,09	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	15 Laporan	100,00	Telah terealisasi 15 laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yaitu laporan bulan Januari sampai dengan November, 3 laporan triwulanan dan 1 laporan semester. Sedangkan untuk laporan bulan Desember dan Triwulan IV akan selesai pada bulan Januari tahun berikutnya

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% EFISIENSI		OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	132.000.000	126.022.899	95,47	4,53	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	3 Laporan	100,00	Telah terealisasi 3 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi yaitu draft laporan keuangan, laporan keuangan unauditted dan laporan keuangan auditted
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	152.150.000	130.009.654	85,45	14,55	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2024
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	66.550.000	55.433.526	83,30	16,70	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disusun sebanyak 1 dokumen
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90.000.000	87.004.497	96,67	3,33	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	123 Orang	123 Orang	100,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 123 orang yang berasal dari 59 Perangkat Daerah
7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	50.970.000	50.106.962	98,31	1,69	Jumlah BLUD kabupaten/Kota yang dibina	40 Lembaga	40 Lembaga	100,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD telah selesai dilaksanakan. Pembinaan dilaksanakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan karena terdapat banyak perubahan pada bendahara sehingga diperlukan untuk pembinaan pengelolaan BLUD secepatnya agar pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% EFISIENSI		OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	697.697.423.448	690.090.186.084	98,91	1,09	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini juga mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada kegiatan ini juga merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi pajak daerah. Pagu anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp. 697.697.423.448,00 terealisasi sebesar Rp. 690.090.186.084,00 atau 98,90 dengan tingkat efisiensi sebesar 1,10%
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	652.316.034.000	652.151.034.000	99,97	0,03	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	Telah terealisasi laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan bulan Januari s.d Desember serta penyaluran bantuan keuangan 99,97% telah disalurkan kepada pihak terkait
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.951.050.997	26.020.100.684	84,07	15,93	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Dana Darurat dan Mendesak sampai dengan triwulan IV telah tersalurkan sebesar Rp. 26.020.100.684,00 atau 84,07%
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.430.338.451	11.919.051.400	82,60	17,40	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Dana bagi hasil Kabupaten/Kota telah tersalurkan sebesar Rp. 11.919.051.400,00 atau 82,60%

*Sumber: BPKPD TA 2024 (diolah)

3.1.3 Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan

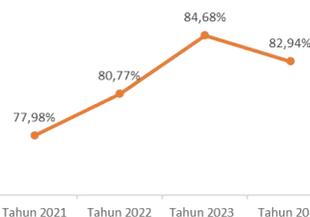
Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel



Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan



Perbandingan dengan tahun sebelumnya



Perbandingan dengan akhir tahun Renstra

Target akhir Renstra	Capaian terhadap target akhir Renstra
90%	92,17%

Perbandingan dengan Capaian Nasional

Target		Realisasi	
BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Nasional	BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Nasional
86%	-	82,95%	-

Gambar 3.4

Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan

Barang Milik Daerah (BMD) adalah aset yang dimiliki daerah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. BMD dapat berupa aset lancar (persediaan) dan aset tetap (Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari perolehan lain yang sah. Perolehan lain yang sah dapat berupa hibah, perjanjian, ketentuan undang-undang, atau keputusan pengadilan sehingga BMD harus dikelola dengan baik salah satunya yaitu melakukan pengamanan terhadap BMD. Tujuan dari pengamanan BMD yaitu untuk mencegah penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain, memastikan BMD dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjamin tertib administrasi BMD. Pengamanan BMD dilakukan secara fisik dan administratif.

Pengamanan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap tanah/bangunan yaitu dengan cara membuat plang tanah/bangunan sebagai tanda bahwa tanah/bangunan tersebut milik pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta melakukan pengamanan administratif berupa penerbitan sertipikat. Untuk kendaraan sendiri bentuk pengamanan secara administratif berupa surat kendaraan atau BPKB.

Berdasarkan data per 29 Desember 2023 jumlah Kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 3.240 unit dan yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sebanyak 2.856 unit sedangkan untuk Bidang Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 683 bidang dan yang telah memiliki bukti kepemilikan sebanyak 466 bidang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat Barang Milik Daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah. Sehingga hal tersebut masih menjadi isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang harus diselesaikan dengan baik.

Terdapat koreksi data mengenai tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dimana pada bulan Februari jumlah bidang tanah sebanyak 680 bidang dan yang telah bersertifikat sebanyak 466 bidang. Namun hasil audit BPK RI dilakukan kembali revisi terhadap jumlah bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil audit dimana dikembalikan 11 bidang tanah yang belum sertifikat, 1 aset yang sudah bersertifikat dan 1 yang merupakan hibah dari PSU Cintaraja. Sehingga data per Juli 2024 total bidang tanah sebanyak 685 bidang dengan yang telah bersertifikat sebanyak 463 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 222 bidang. Sedangkan agar data yang digunakan selaras dengan penilaian MCP KPK maka Investasi Non Permanen yang sebelumnya tidak dimasukkan menjadi dimasukkan ke dalam data bidang tanah Pemerintah Daerah. Sehingga Bidang tanah

yang telah bersertipikat yaitu 694 bidang dengan rincian 469 sudah bersertipiat dan 225 belum bersertipikat.

Bidang tanah yang telah bersertipikat diantaranya sarana Pendidikan sebanyak 244 bidang/248 sertipikat, sarana Kesehatan sebanyak 25 bidang/28 sertipikat, Tanah di bawah jalan (ruas jalan) 7 bidang/68 sertipikat, sarana perkantoran dan rumah dinas 90 bidang/114 sertipikat, sarana umum 65 bidang/71 sertipikat, jembatan 3 bidang/3 sertipikat, sarana lainnya 27 bidang/38 sertipikat. Sedangkan untuk yang belum bersertipikat sebanyak 225 bidang terdiri dari 34 bidang tanah, 165 bidang tanah dibawah jalan dan 26 bidang tanah pengairan.

Pada akhir tahun 2024 terdapat perubahan data aset kembali, dimana berdasarkan temuan BPK terdapat 18 tanah dibawah jalan (belum bersertipikat) yang harus dimasukkan kedalam KIB atas dasar perubahan SK ruas jalan, hasil penilaian di lapangan adanya penambahan 2 bidang tanah dari sekolah (SDN Cigadog 3 dan SMPN 1 Sukahening), terdapat 8 bidang (sudah bersertipikat) dari penyerahan PSU 4 Perumahan (Mutiara Putra Ciawi regency 2 bidang, Cikunir Kencana Raya 2 bidang, Bale Resik 2 bidang dan Margamulya Indah Regency 2 bidang). Adanya penambahan 17 bidang tanah (sudah bersertipikat) yang merupakan hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berdasarkan perjanjian antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B-13/EK.11/26/09/2024 dan Nomor: B/4268/UM.01/BPKPD/2024 pada tanggal 15 September 2024.

Selanjutnya terdapat penambahan 3 bidang tanah dari belanja modal diantaranya Dinas Pendidikan untuk pembangunan SDN Babakan Jeruk, Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Culamega dan Dinas PUPR untuk TPS Nangkalea.

Sehingga total bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu 742 bidang diantaranya 503 sudah bersertipikat dan 239 bidang belum bersertipikat.

Untuk tahun 2024 ditargetkan menghasilkan 300 sertipikat dengan melakukan pensertipikatan terhadap ruas jalan Papayan-Cikalong, ruas jalan Mangunreja-Sukaraja dengan panjang 62 KM, 1 tanah untuk makam Pahlawan (Desa Sukarapih Blok Sukalilah Sukarame) dan 3 tanah bangunan sekolah diantaranya SMP Satu Atap 1 Mangunreja, SDN 2 Cigadog dan SDN Sirnagalih. Pada tahun 2024 difokuskan pada ruas jalan Mangunreja-Sukaraja sepanjang 62 KM hal tersebut berkaitan dengan akan dilakukannya peningkatan status jalan dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi. Salah satu syarat untuk peningkatan status yaitu ruas jalan tersebut harus telah bersertipikat. Sehingga apabila telah naik status menjadi jalan milik Provinsi, diharapkan jalan tersebut dapat terpeliharakan dengan baik mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap jalan tersebut.

Sampai dengan akhir tahun telah selesai melakukan pengukuran terhadap seluruh ruas jalan yang akan disertipikatkan dan telah terbit 8 sertipikat hasil pengukuran Tahun 2023 pada ruas jalan Mangunreja-Sukaraja, 300 sertipikat pada ruas jalan Papayan – Cikalong, serta 3 sertipikat bidang tanah/bangunan SMP Satu Atap 1 Mangunreja, SDN 2 Cigadog dan SDN Sirnagalih. Sedangkan pensertipikatan untuk tanah makam pahlawan di Desa Sukarapih Blok Sukalilah Sukarame tidak terealisasi dikarenakan belum selesai penandatanganan batas tetangga sehingga tidak dapat diajukan untuk di proses penerbitan sertipikat.

Sedangkan untuk bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), terdapat perubahan jumlah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimana sebelumnya jumlah kendaraan sebanyak 3.240 unit kendaraan menjadi 2.911 unit kendaraan.

Hal tersebut dikarenakan adanya belanja modal berupa 2 unit kendaraan roda empat dan 15 unit roda dua serta adanya hibah 346 unit kendaraan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Hibah tersebut atas permohonan dari APDESI yang memohon agar kendaraan Roda 4 (empat) berupa kendaraan dinas operasional Desa untuk dapat disetujui dihibahkan kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), bahwa kendaraan yang telah dihibahkan mengubah status aset menjadi milik instansi pengusul dan harus dihapuskan dari daftar aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan penghapusan aset tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Maka dilakukan kesepakatan yang menghasilkan Berita Acara Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172.2/BA.16-DPRD/2024 dan Nomor: B/4296/UM.01/BPKPD/2024 tentang Hibah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Agustus 2024. Berita Acara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD telah sepakat dan menyatakan persetujuan atas hibah kendaraan Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 346 unit kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan kendaraan operasional Desa.

Sampai dengan akhir tahun 2024 belum ada yang menyerahkan BPKB. Terdapat 384 kendaraan yang belum ada bukti kepemilikan, kendala yang dihadapi yaitu kendaraan yang tercatat pada setiap Perangkat Daerah dalam kondisi kurang baik dan belum ditemukan bukti kepemilikannya. Maka ditekankan kepada Perangkat Daerah untuk dapat menelusuri dan menyerahkan BPKPB atau melakukan pengajuan penghapusan kendaraan. Apabila BPKB tersebut tidak ditemukan, diharapkan Perangkat Daerah melakukan duplikasi terhadap BPKB tersebut.

Untuk capaian indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan, jumlah Kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 2.911 unit dan yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sebanyak 2.527 unit sedangkan untuk bidang tanah sebanyak 742 bidang dengan yang telah bersertifikat sebanyak 503 bidang. Berdasarkan data diatas, capaian indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan pada tahun 2024 yaitu 82,94% dengan capaian kinerja sebesar 96,45% dari target 86%. Capaian 2024 tersebut menunjukkan capaian yang lebih rendah dari capaian tahun 2023 dikarenakan terdapat revisi data jumlah bidang tanah dan kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Jumlah Bidang Tanah dan Kendaraan mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan tersebut dikarenakan adanya revisi hasil dari temuan BPK RI, pemeriksaan lapangan, perhitungan MCP, Hibah dari PSU, hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta adanya belanja modal tanah/bangunan untuk infrastruktur. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah kendaraan, dimana data pada tahun 2023 jumlah Kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 3.240 unit dengan rincian 2.856 telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sedangkan 384 belum memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB. Untuk lebih jelasnya perbandingan data dan capaian indikator Persentase BMD yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

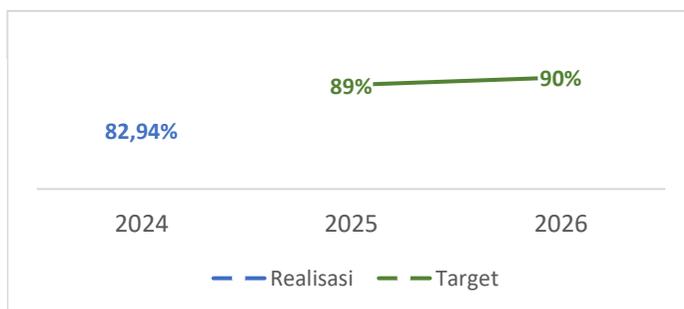
Tabel 3.9
Capaian Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang
Telah Dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Uraian BMD		Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Kendaraan		Unit	3.170	3.195	3.240	2.911
Jumlah Tanah	Bidang	Bidang	771	741	683	742
Total		unit/bidang	3.941	3.936	3.923	3.652
Jumlah Kendaraan yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan		Unit	2.681	2.719	2.856	2.527
Jumlah Tanah yang Memiliki Bukti Kepemilikan	Bidang	Bidang	392	460	466	503
Total		unit/bidang	3.073	3.179	3.322	3.030
Realisasi		%	77,98	80,77	84,68	82,95
Target		%	77	81	83	86
Capaian Kinerja		%	101,27	99,72	102,02	96,45

*Sumber: BPKPD TA 2024 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka sampai tahun keempat Renstra telah mencapai 92,16% untuk target akhir renstra sendiri yaitu 90%. Tidak akan mudah mencapai target tersebut, karena terdapat perubahan data. Sehingga akan dilakukan perubahan target pada tahun berikutnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target nasional tidak ada indikator yang sama dengan persentase BMD yang telah dilengkapi dengan kepemilikan.

Grafik 3.3
Perbandingan capaian Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 tidak melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Pada awal target renstra ditargetkan dapat terealisasi 100 bidang tanah yang sudah bersertipikat untuk setiap tahunnya, namun untuk tahun 2024 berfokuskan pada tanah dibawah jalan. Dimana 1 ruas jalan sangat luas dan menghasilkan 300 sertipikat. Meskipun menghasilkan sertipikat yang sangat banyak tetapi tetap hanya dihitung 1 bidang;
2. Terdapat perubahan data mengenai tanah/bangunan dan kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terutama perubahan data kendaraan yang sangat signifikan karena adanya hibah kendaraan sebanyak 346 unit dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa;
3. Terdapat keterlambatan dalam pengukuran dan penerbitan Sertipikat, hal tersebut dikarenakan harus menyesuaikan dengan jadwal BPN yang sedang membereskan PTSL;
4. Terdapat keterlambatan dalam penandatanganan Warkah yang harus ditandatangani oleh saksi/warga yang memiliki tanah yang berbatasan dengan batas jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Belum ada penyerahan bukti kepemilikan atas kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari Perangkat Daerah.

Maka upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu:

1. Melakukan penyesuaian terhadap data tanah/bangunan dan kendaraan yang riil dilapangan;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak ATR/BPN terkait jadwal dalam pengukuran dan penerbitan sertifikat;

3. Melakukan koordinasi dengan Dinas PUTRPRKPLH yang mengetahui batas ruas jalan yang akan dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat;
4. Melakukan pematokan terhadap tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Melakukan penekanan kepada Perangkat Daerah agar menelusuri bukti kepemilikan kendaraan milik Pemerintah Daerah.

Rekomendasi untuk meningkatkan ketercapaian pada sasaran mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel, antara lain :

1. Melakukan perubahan target indikator sasaran karena adanya perubahan data mengenai kendaraan;
2. Melakukan percepatan pengukuran terhadap ruas jalan, tanah atau bangunan pada awal tahun anggaran;
3. Melakukan pendekatan dengan ahli waris yang memiliki tanah bersengketa agar dapat *clear and clean*;
4. Melakukan kerjasama dengan ATR/BPN untuk dapat membantu memecahkan permasalahan pensertifikatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan didukung oleh program pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan BMD tersebut diantaranya yaitu melakukan penyusunan dokumen Standar Harga Barang, membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, melakukan pengamanan BMD serta melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD. Program pengelolaan keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan dukungan 4 sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 956.852.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 955.508.449,00 atau 99,86% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,14%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang berlaku
didukung oleh program pengelolaan BMD
Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% Efisiensi	%	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	956.852.100	955.508.449	99,86	0,14	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86,00%	82,95%	96,45%	Indikator program ini yaitu persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Maka dari itu, program ini sangat mendukung pada program MCP KPK mengenai penertiban BMD. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan telah mencapai 83,18% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 955.508.449,00 atau 99,86% dengan efisiensi sebesar 0,14%. Indikator program tidak mencapai target karena terdapat perubahan terhadap data tanah dan kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya yaitu 346 unit kendaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dihibahkan kepada Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya.
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.852.100	955.508.449	99,86	0,14	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini mendukung pada pencapaian kinerja indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Sub kegiatan yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah diantaranya pengamanan BMD yang melaksanakan pensertifikatan bidang tanah, Penyusunan SSH, Penyusunan RKBMD serta melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada triwulan III telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 955.508.499,00 atau 99,86% serta terdapat efisiensi sebesar 0,14%

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% Efisiensi		OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	Penyusunan Standar Harga	131.267.000	130.673.408	99,55	0,45	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Telah tersusun dokumen perubahan standar harga tahun 2024 dan dokumen SSH n+2
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	31.735.100	31.735.100	100,00	0,00	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Telah tersusun dokumen perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2024 dan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2025
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	539.850.000	539.204.941	99,88	0,12	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00	Telah terbit 8 sertipikat hasil pengukuran Tahun 2023 pada ruas jalan Mangunreja-Sukaraja, 300 sertipikat pada ruas jalan Papayan – Cikalong, serta 3 sertipikat bidang tanah/bangunan SMP Satu Atap 1 Mangunreja, SDN 2 Cigadog dan SDN Sirnagalih. Serta membuat 19 plang tanah untuk identitas tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
4	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	254.000.000	253.895.000	99,96	0,04	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan Perangkat Daerah dilaksanakan rutin setiap bulannya

*Sumber: BPKPD TA 2024 (diolah)

3.1.4 Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah



Pagu Anggaran
Rp. 4.525.061.000,00

Realisasi
Rp. 4.302.000.388,00 atau **95,07%**

Efisiensi
4,93%



Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Perbandingan dengan tahun sebelumnya



Perbandingan dengan akhir tahun Renstra

Target akhir Renstra	Capaian terhadap target akhir Renstra
5,30%	117,55%

Perbandingan dengan Capaian Nasional

Target		Realisasi	
BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Nasional	BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Nasional
5,18%	-	6,23%	3,50%

Gambar 3.5
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsi PKB dan Opsi BBNKB.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Daerah. Manfaat dari pemungutan pajak daerah, antara lain: mendukung anggaran dan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, menjadi indikator keberhasilan investasi di Daerah serta menjadi ukuran kinerja Pemerintahan dalam aspek pengembangan wilayah. Untuk itu

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diharapkan berdampak langsung kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pajak daerah, yaitu melakukan *updating* data pajak, menggunakan teknologi untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak .

Target penerimaan pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 110.710.124.764,00, berdasarkan LRA *Preliminary* per tanggal 8 Januari 2025 realisasi yang diterima dari pajak daerah tersebut sebesar 94,13% atau Rp. 104.211.397.105,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 jenis pajak tidak melampaui target yang telah ditetapkan, diantaranya Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan LRA *Preliminary* per tanggal 8 Januari 2025, pajak daerah tersebut tumbuh sebesar 6,23% dari realisasi pajak daerah tahun 2023 yang mencapai Rp. 98.097.622.047,00. Perhitungan pertumbuhan pajak daerah tersebut dihasilkan dari selisih penerimaan pajak daerah tahun 2024 dengan tahun 2023, lalu dibandingkan dengan tahun 2023 ($\left(\frac{104.211.397.105-98.097.622.047}{98.097.622.047} \times 100\%\right) = 6,23\%$). Capaian pertumbuhan pajak tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan, dimana target persentase pertumbuhan pajak daerah untuk tahun 2024 yaitu 5,18% dan tersealisasi 6,23% sehingga persentase capaian kinerja untuk indikator tersebut yaitu 120,27%.

Penerimaan pajak daerah selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan pasca pandemi *Covid-19*. Peningkatan pertumbuhan pajak daerah tersebut terjadi karena adanya geliat perekonomian pasca pandemi *Covid-19*, sehingga

pencapaian terhadap penerimaan pajak daerah bertambah. Pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 25,21% sedangkan pertumbuhan pajak untuk Tahun 2023 berdasarkan *auditted* sebesar 3,97%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Capaian Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah
Tahun 2021-2024

No	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp.)	Target Pertumbuhan Pajak Daerah	Realisasi Pertumbuhan Pajak Daerah	% Capaian Kinerja
1	2021	75.360.502.247	4,99%	8,14%	163,13%
2	2022	94.355.650.449	5,01%	25,21%	503,11%
3	2023	98.097.622.047	5,11%	3,97%	77,61%
4	2024	104.211.397.105	5,18%	6,23%	120,32%

*Sumber: BPKPD TA 2024 (diolah)

Pada tahun 2024 berdasarkan LRA *Preliminary* per tanggal 8 Januari 2025 mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu 6,23%. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.4
Pertumbuhan Pajak Daerah



Penerimaan pajak daerah tumbuh positif setiap tahunnya dengan pertumbuhan yang berbeda-beda. Pertumbuhan terbesar pada tahun 2022 yaitu sebesar 25,21% sedangkan yang terkecil yaitu pada tahun 2023 dengan besaran 3,97%. Pada tahun 2024 tumbuh dengan baik mencapai 6,23%. Penyumbang

pajak daerah terbesar yaitu pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp. 31.449.974.764,00 dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT Tenaga listrik) sebesar Rp. 54.388.641.556,00. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah pada akhir renstra ditargetkan tumbuh sebesar 5,30%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai 117,55%.



Grafik 3.5
Perbandingan capaian tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026

Persentase pertumbuhan pajak daerah ditargetkan sebesar 5,18% dan telah teralisasi sebesar 6,23% sedangkan untuk penerimaan pajak Nasional pada Tahun 2024 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per akhir Desember mencapai Rp. 1.932,4 triliun atau 97,2% terhadap target APBN apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 3,50%. Pertumbuhan penerimaan pajak nasional pada tahun 2024 didorong oleh beberapa faktor, di antaranya: Efektivitas reformasi perpajakan, peningkatan aktivitas ekonomi dalam negeri serta peningkatan impor, terutama pada sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit. Beberapa kebijakan reformasi perpajakan yang diterapkan pada tahun 2024, di antaranya: Implementasi NIK sebagai NPWP, Fokus pada wajib pajak dengan penerimaan yang tinggi, Implementasi sistem inti perpajakan (*core tax system*), Pemanfaatan forensik digital, Kerjasama global dari sisi perpajakan.

Terdapat tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pajak daerah. Dimana data base yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di beberapa daerah. Rendahnya kesadaran pajak dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah sering kali menyebabkan banyak wajib pajak tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan pajak daerah turut menghambat upaya optimalisasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPKPD telah melakukan upaya yang optimal pada tahun 2024, diantaranya:

1. BPKPD telah melakukan kajian potensi Pajak Daerah yang diharapkan dapat memberikan gambaran besaran pajak daerah yang dapat diterima serta memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah;
2. Telah melakukan pemuktahiran data pajak daerah melalui pendataan dan pendaftaran terhadap objek pajak daerah;
3. Telah menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis digital, wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran melalui *Qris*, *mobile banking* dan *e-commerce* lainnya yang tersedia;
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat secara *online* maupun *offline*. Edukasi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam pembangunan daerah mereka. Ketika masyarakat memahami manfaat dari pajak yang mereka bayar, tingkat kepatuhan pajak diharapkan meningkat.
5. Telah melakukan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta turunannya berupa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun

2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dan Pemeriksaan Pajak Daerah ;

6. Telah melakukan pengembangan Aplikasi Pajak Daerah Online serta pembangunan Elektronik Retribusi Kabupaten Tasikmalaya, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengelola pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan penerimaan daerah;
7. Melakukan inovasi berupa Pendataan obyek bangunan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun *Call Center* untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan masalah atau keluhan, pengadaan *Whatsapp Broadcast* sebagai sarana mempermudah penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak, Pengembangan aplikasi pajak daerah online (APDOL) yang bermanfaat untuk menyediakan informasi, *database*, fasilitas pembayaran secara *online* dan realisasi penerimaan pajak daerah untuk jenis pajak selain PBB-P2 dan BPHTB;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di lingkungan BPKPD.

Upaya kedepan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan ketercapaian pada sasaran meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah, antara lain:

1. Melakukan inovasi pajak daerah dengan penerapan teknologi yangi tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga meminimalkan

- potensi kecurangan serta meningkatkan akurasi dan transparansi data pajak daerah;
2. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang domisilinya jauh dari pusat kota, dengan cara memberikan kemudahan pelayanan pajak daerah secara online;
 3. Melakukan kerjasama dengan pihak APH dalam melakukan penegakan hukum bagi wajib pajak yang melanggar;
 4. Melakukan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat secara *online* maupun *offline*. Edukasi tersebut dengan berbagai media yang mampu memberikan pemahaman secara menarik kepada wajib pajak, sehingga mudah dipahami dan diharapkan meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab membayar pajak;
 5. Melakukan pemutakhiran data pajak daerah dan memperluas basis pajak daerah. Dengan melakukan sensus pajak daerah yang akurat dan memperbarui basis data, pemerintah dapat mengenali dan menarik lebih banyak wajib pajak baru, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat;
 6. Memaksimalkan potensi pajak yang dimiliki oleh daerah.

Indikator persentase Pertumbuhan Pajak Daerah yang telah didukung oleh program pengelolaan Pendapatan Daerah. Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut diantaranya yaitu melakukan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, membuat kajian potensi pajak daerah, melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak, melakukan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, melakukan pelayanan serta penagihan pajak daerah serta memberikan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan pajak daerah. Program pengelolaan keuangan terdiri dari 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan pagu anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 4.525.061.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.302.000.388,00 atau 95,07% dengan tingkat efisiensi

sebesar 4,93%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator persentase Pertumbuhan Pajak Daerah
Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (RP.)	REALISASI (RP.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.525.061.000	4.302.000.388	95,07	4,93	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Program ini sangat menunjang pada pencapaian indikator kinerja pertumbuhan pajak daerah. Indikator program ini adalah persentase pengelolaan pajak daerah. Apabila pengelolaan pajak daerah baik, maka pertumbuhan pajak pun akan meningkat. Pengelolaan pendapatan Daerah sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 4.302.000.388,00 atau 95,07% dengan output kinerja sebesar 100% serta tingkat efisiensi 4,93%
I	Pengelolaan pendapatan Daerah	4.525.061.000	4.302.000.388	95,07	4,93	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian persentase pengelolaan pajak daerah. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, yang mempunyai peran secara langsung dalam pertumbuhan pajak daerah antara lain melakukan penagihan pajak daerah, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pengendalian dan pemeriksaan pengawasan pajak daerah serta peningkatan pada sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah serta melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Daerah. Pengelolaan pendapatan Daerah sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 4.302.000.388,00 atau 95,07% dengan output kinerja sebesar 100% serta tingkat efisiensi 4,93%

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (RP.)	REALISASI (RP.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	284.671.000	281.803.271	98,99	1,01	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00	Telah melakukan pembangunan aplikasi Retribusi Daerah yang diharapkan akan membantu dalam melakukan pengelolaan serta monitoring terhadap penerimaan retribusi daerah
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	584.655.000	528.487.971	90,39	9,61	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00	Telah melakukan Kajian terhadap Potensi Pajak Daerah dan Kajian Potensi Reklame yang ada di Kabupaten Tasikmalaya
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	106.495.000	105.410.996	98,98	1,02	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00	Telah melakukan penyuluhan terhadap 86 wajib pajak dari target 100 wajib pajak dan laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah telah terealisasi 4 laporan triwulanan
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.931.000.000	1.901.299.455	98,46	1,54	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	29 Unit	29 Unit	100,00	Melakukan percetakan (DHKP PBB, TTS, SPPT PBB, STTS dan pengadaan 3 countinuous form), peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah khususnya untuk pelayanan pajak daerah serta pembangunan untuk billboard yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	75.580.000	74.809.460	98,98	1,02	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00	Telah melakukan Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB sebanyak 380 Wajib Pajak serta Pendataan dan Pemutakhiran Data Non PBB sebanyak 50 Wajib Laporan terhadap hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah telah terealisasi 3 laporan triwulanan

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (RP.)	REALISASI (RP.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	512.550.000	511.671.210	99,83	0,17	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	1 Layanan	100,00	layanan dan konsultasi pajak daerah dilaksanakan rutin
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	43.256.000	43.224.000	99,93	0,07	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dilaksanakan rutin
8	Penagihan Pajak Daerah	830.970.000	705.888.325	84,95	15,05	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Penagihan Pajak Daerah dilaksanakan seccara rutin
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	155.884.000	149.405.700	95,84	4,16	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah telah terealisasi 4 laporan triwulanan

*Sumber: BPKPD TA 2024 (diolah)

3.2 Realisasi Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya sebagai fungsi penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah namun juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kegiatan yang merupakan unsur PPKD yaitu kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2024 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 737.703.200.417,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp. 22.836.075.321,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp. 698.321.517.548,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 16.540.969.025,00. Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan *time schedule* yang telah tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumen perubahan rencana aksi BPKPD Tahun 2024.

BPKPD berusaha melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai kinerja yang baik. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Realisasi anggaran BPKPD sampai dengan Triwulan IV mencapai 98,66% atau sebesar Rp. 727.206.598.943,00 dengan

persentase *output* sebesar 101,25%. Terdapat 59 (Lima puluh sembilan) sub kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dengan *output* 100%, sedangkan terdapat 1 sub kegiatan yang tercapai 175% yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dimana ditargetkan 4 dokumen dan terealisasi 7 dokumen.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	78,25	87,52	111,85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.242.098.246	28.345.187.797	93,73	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah	(1) 82 (2) 86,80	(1) 82 (2) 86,81	100,00
I							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.000.000	265.510.178	98,70	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101 dokumen	101 dokumen	100,00
1							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.000.000	140.649.178	98,36	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	27 dokumen	27 dokumen	100,00
2							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.000.000	124.861.000	99,10	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	74 dokumen	74 dokumen	100,00
II							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.836.075.321	21.358.189.623	93,53	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	100%	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.836.075.321	21.358.189.623	93,53	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang	95 orang	100,00
III							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.340.000	439.326.156	98,21	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	100%	100,00
1							Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	84.190.000	81.940.000	97,33	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	100,00
2							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	363.150.000	357.386.156	98,41	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	142 orang	142 orang	100,00
IV							Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.331.716.225	2.231.468.727	95,70	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100,00
1							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.500	49.418.500	98,84	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
2							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	640.084.800	617.700.350	96,50	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.997.500	58.698.800	97,84	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
4							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.200.000	101.580.000	88,18	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
5							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	760.169.400	752.290.400	98,96	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
6							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	53.750.000	76,79	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
7							Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.000.000	180.000.000	100,00	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	4 Laporan	100,00
8							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.165.025	351.850.677	90,64	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00
9							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	68.100.000	66.180.000	97,18	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	914.731.400	898.081.900	98,18	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00
1							Pengadaan Mebel	81.690.000	75.550.000	92,48	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
2							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	833.041.400	822.531.900	98,74	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	43 Unit	43 Unit	100,00
VI							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.670.500	1.525.825.131	90,25	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.270.500	850.993.117	85,68	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.000.000	62.000.000	98,41	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634.400.000	612.832.014	96,60	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
VII							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.752.564.800	1.626.786.082	92,82	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	902.230.000	784.455.822	86,95	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	70 Unit	100,00
2							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	460.440.000	456.965.260	99,25	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	253 unit	253 unit	100,00
3							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	389.894.800	385.365.000	98,84	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	701.350.456.448	693.603.902.309	98,90	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	101,14%	101,70
I							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.415.072.000	2.387.838.983	98,87	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100,00%	106,82%	106,82
1							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.450.000	62.087.560	99,42	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	62.450.000	61.581.014	98,61	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	60.042.000	59.738.550	99,49	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	57.450.000	54.559.975	94,97	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00
5							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	72.500.000	70.853.988	97,73	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00
6							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	66.440.000	66.198.531	99,64	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00
7							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	234.200.000	231.983.618	99,05	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	228.290.000	227.161.523	99,51	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
9							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	613.980.000	604.863.320	98,52	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	4 Dokumen	7 Dokumen	175,00
10							Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	607.394.000	602.813.248	99,25	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
11							Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	349.876.000	345.997.656	98,89	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	318 Orang	318 Orang	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	492.461.000	475.257.886	96,51	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	52.050.000	51.007.500	98,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	236 Dokumen	100,00
2							Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	181.200.000	173.493.861	95,75	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3							Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	119.211.000	110.810.550	92,95	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
4							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	140.000.000	139.945.975	99,96	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
III							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	745.500.000	650.619.356	87,27	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	143.930.000	123.007.865	85,46	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00
2							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	109.900.000	79.033.953	71,91	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	15 Laporan	100,00
3							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	132.000.000	126.022.899	95,47	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	3 Laporan	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	152.150.000	130.009.654	85,45	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
5							Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	66.550.000	55.433.526	83,30	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
6							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90.000.000	87.004.497	96,67	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	123 Orang	123 Orang	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7							Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	50.970.000	50.106.962	98,31	Jumlah BLUD kabupaten/Kota yang dibina	40 Lembaga	40 Lembaga	100,00
IV							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	697.697.423.448	690.090.186.084	98,91	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	652.316.034.000	652.151.034.000	99,97	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.951.050.997	26.020.100.684	84,07	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3							Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.430.338.451	11.919.051.400	82,60	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	86	82,94	96,44	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	956.852.100	955.508.449	99,86	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86,00%	82,95%	96,45%
I							Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.852.100	955.508.449	99,86	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Penyusunan Standar Harga	131.267.000	130.673.408	99,55	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
2							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	31.735.100	31.735.100	100,00	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
3							Pengamanan Barang Milik Daerah	539.850.000	539.204.941	99,88	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4							Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	254.000.000	253.895.000	99,96	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00
IV	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,18	5,34	103,09	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.525.061.000	4.302.000.388	95,07	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00
I							Pengelolaan pendapatan Daerah	4.525.061.000	4.302.000.388	95,07	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	284.671.000	281.803.271	98,99	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2							Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	584.655.000	528.487.971	90,39	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00
3							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	106.495.000	105.410.996	98,98	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI	REALISASI		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
									(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.931.000.000	1.901.299.455	98,46	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	29 Unit	29 Unit	100,00
5							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	75.580.000	74.809.460	98,98	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00
6							Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	512.550.000	511.671.210	99,83	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	1 Layanan	100,00
7							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	43.256.000	43.224.000	99,93	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
8							Penagihan Pajak Daerah	830.970.000	705.888.325	84,95	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
9							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	155.884.000	149.405.700	95,84	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
							JUMLAH	737.074.467.794	727.206.598.943	98,66	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN (%)			101,25

*Sumber: BPKPD TA 2024 (Data preliminary serta diolah) per 8 Januari 2025



**PEMKAB
TASIKMALAYA**

BAB IV PENUTUP



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

BAB IV PENUTUP

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja BPKPD dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. LKIP BPKPD Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi BPKPD selama tahun 2024. BPKPD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik dengan rata-rata 107,14%.

Sebagian besar sasaran strategis BPKPD sudah mencapai target, dari 4 indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator dengan hasil realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 111,85% dan Persentase pertumbuhan pajak daerah dengan capaian kinerja 120,27%. Indikator yang sesuai target dengan capaian 100% yaitu Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sedangkan untuk indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu ditargetkan tercapai 86% namun terealisasi 82,95%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 pensertipikatan tanah/bangunan milik daerah berfokus pada pensertipikatan ruas jalan dan terdapat perubahan data mengenai tanah/bangunan milik pemerintah daerah dari hasil temuan BPK RI, hibah dan belanja modal serta terdapat 346 unit kendaraan yang dihibahkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sehingga mempengaruhi kepada persentase perhitungan BMD yang telah memiliki bukti kepemilikan.

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber

daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp 737.703.200.417,00 dengan penyerapan sebesar Rp. 727.206.598.943,00 atau 98,66% maka terdapat tingkat efisiensi sebesar 1,34% atau senilai Rp. 9.867.868.851,00.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya melakukan perbaikan internal berupa penyempurnaan tata kelola dan pelayanan. Perbaikan tersebut didukung dengan berbagai inovasi dan efisiensi yang didasari pada transformasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi serta didukung dengan peningkatan integritas. Transformasi dan perbaikan yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2024 akan menjadi modal dasar untuk mendorong pencapaian sasaran BPKPD untuk tahun berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di Pusat, Provinsi maupun Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif serta melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pajak daerah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait, serta hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tasikmalaya, 24 Januari 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

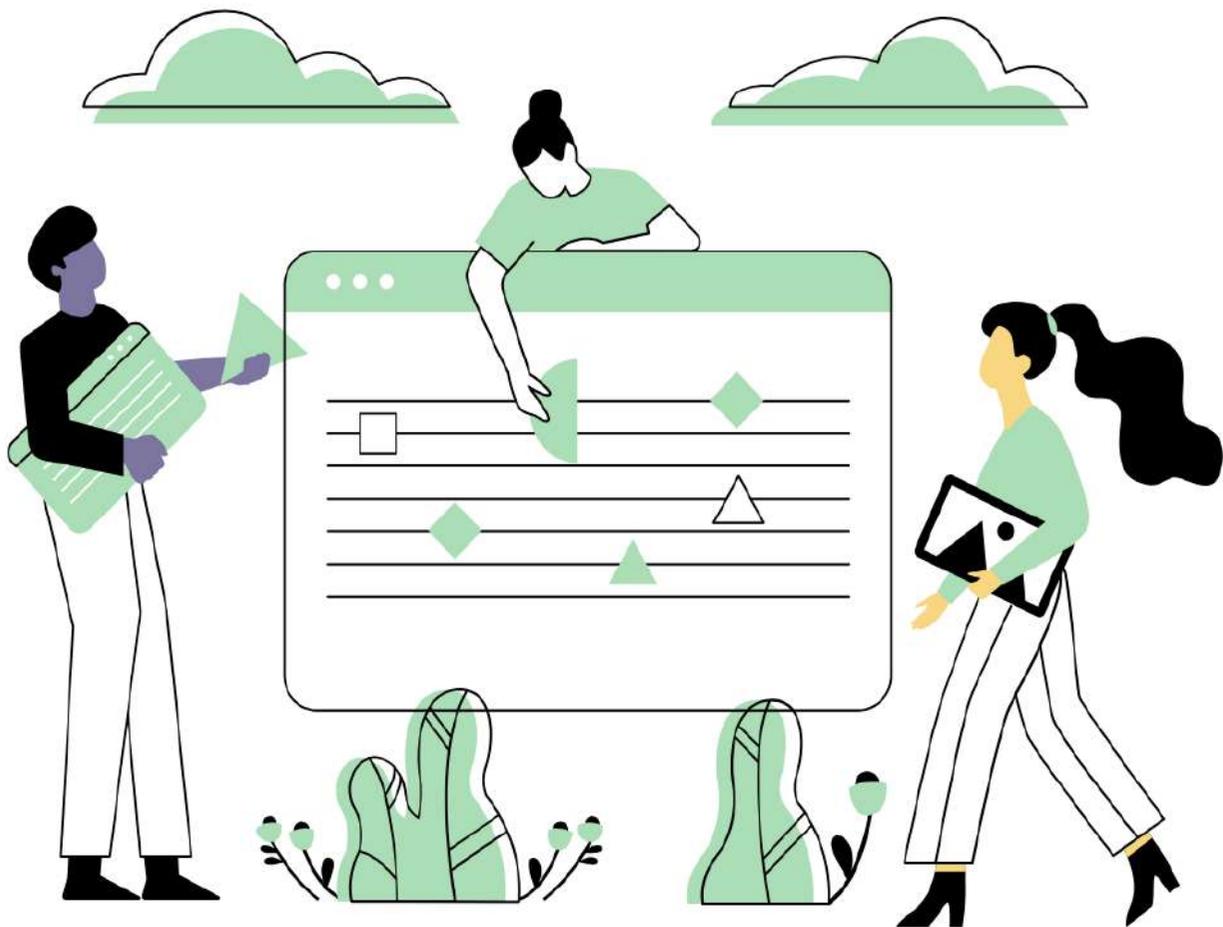


Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



**PEMKAB
TASIKMALAYA**

BAB V LAMPIRAN



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN

Tabel 1.1
Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2024
1	Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79

Tabel 1.2
Sasaran Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Indikator Sasaran PD Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,25
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,18

Tabel 1.3
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2024

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		82	82	27.683.796.266	27.744.796.266	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah		87,00	87,00	7.019.022.925	7.160.473.425	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95 Dokumen	101 Dokumen	208.000.000	269.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	23 Dokumen	27 Dokumen	143.000.000	143.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	72 Laporan	74 Laporan	65.000.000	126.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan		100 %	100 %	27.475.796.266	27.475.796.266	

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1316 Orang/bulan	95 Orang/bulan	27.475.796.266	27.475.796.266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD		100 %	100 %	447.340.000	447.340.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Paket	2 Paket	84.190.000	84.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152 Orang	143 Orang	363.150.000	363.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		100 %	100 %	2.711.416.225	2.332.416.225	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	30.000.000	49.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	3 Paket	640.084.800	640.084.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	39.997.000	59.997.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	350.000.000	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	760.169.400	760.169.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Laporan	4 Laporan	328.000.000	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Laporan	4 Laporan	488.165.025	388.165.025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	64.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor		100 %	100 %	606.381.900	881.381.900	
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	81.690.000	81.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Unit	43 Unit	524.691.900	799.691.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1.664.000.000	1.708.970.500	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Laporan	12 Laporan	926.000.000	988.470.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Laporan	1 Laporan	63.000.000	63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Laporan	12 Laporan	675.000.000	657.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1.589.884.800	1.790.364.800	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	70 Unit	70 Unit	799.990.000	895.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	143 Unit	255 Unit	400.000.000	505.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	389.894.800	389.894.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	100 %	697.591.118.126	696.395.081.126	
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	100 %	2.175.109.000	2.379.072.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	62.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	62.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	80.000.000	72.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 Dokumen	59 Dokumen	80.000.000	72.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	72.500.000	72.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	76.000.000	76.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	169.800.000	226.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	169.800.000	226.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Penjabaran Perubahan APBD	Penjabaran Perubahan APBD						
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	4 Dokumen	386.770.000	601.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	586.394.000	586.394.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	396 Orang	318 Orang	383.845.000	319.694.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100 %	100 %	531.261.000	531.261.000	
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	236 Dokumen	236 Dokumen	52.050.000	52.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	119.211.000	119.211.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Dokumen	12 Dokumen	140.000.000	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 %	100 %	729.300.000	729.300.000	
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	16 Dokumen	16 Dokumen	143.930.000	143.930.000	Dana Transfer Umum-Dana

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						Alokasi Umum
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	17 Laporan	15 Laporan	89.900.000	99.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	3 Laporan	3 Laporan	132.000.000	132.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	177.500.000	177.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	118 Orang	118 Orang	55.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						Alokasi Umum
7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	40 Lembaga	40 Lembaga	55.970.000	50.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	100 %	694.155.448.126	692.755.448.126	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	650.021.869.000	650.021.869.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000.000	28.600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	14.133.579.126	14.133.579.126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan		86 %	86 %	956.202.100	956.202.100	

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	956.202.100	956.202.100	
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	131.267.000	131.267.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	44.835.100	44.835.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	526.100.000	526.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Laporan	12 Laporan	254.000.000	254.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah		100 %	100 %	4.453.061.000	4.453.061.000	
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah		100 %	100 %	4.453.061.000	4.453.061.000	

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	1 Dokumen	276.280.000	276.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	2 Dokumen	591.280.000	591.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	10 Unit	25 Unit	1.881.000.000	1.881.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4 Laporan	96.280.000	96.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Layanan	1 Layanan	512.550.000	512.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	43.256.000	43.256.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	843.970.000	843.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	108.445.000	108.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL							737.703.200.417	736.709.613.917	

Penghargaan/Prestasi yang Diraih oleh Perangkat Daerah

1. Hasil Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



2. Peringkat Pertama Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024





3. Hasil Penilaian IPKD dengan Peringkat ke-10 Nasional dari tingkat Kabupaten seluruh Indonesia dengan kemampuan keuangan daerah klaster rendah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023.

- 16 -

C. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah "Rendah" sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
1.	GROBOGAN	12,282	19,828	14,483	20	5,438	15	87,03	Baik	A
2.	BINTAN	13,372	20	15	15	7,901	15	86,273	Baik	A
3.	DHARMASRAYA	11,357	20	14,741	20	4,749	15	85,848	Baik	A
4.	ACEH JAYA	9,539	19,138	15	20	7,096	15	85,773	Baik	A
5.	LAMPUNG TENGAH	13,763	20	14,741	20	2,204	15	85,708	Baik	A
6.	ACEH UTARA	14,918	20	15	15	5,72	15	85,638	Baik	A
7.	KUDUS	13,974	20	15	15	6,552	15	85,526	Baik	A
8.	MAROS	13,868	20	15	15	5,728	15	84,596	Baik	A
9.	PESAWARAN	13,358	18,448	14,224	20	3,094	15	84,125	Baik	A
10.	TASIKMALAYA	12,824	19,828	12,414	20	3,941	15	84,007	Baik	A
11.	PURWOREJO	14,271	20	14,483	15	5,085	15	83,839	Baik	A
12.	BANJAR	13,703	20	15	15	5,086	15	83,789	Baik	A
13.	SEMARANG	8,888	20	13,966	20	5,903	15	83,756	Baik	A
14.	PANGKAJENE KEPULAUAN	10,943	20	14,224	20	3,459	15	83,626	Baik	A
15.	BELITUNG TIMUR	13,543	19,655	14,741	15	5,513	15	83,453	Baik	A
16.	ACEH BARAT	12,161	19,31	15	15	6,83	15	83,301	Baik	A
17.	BLORA	13,069	20	15	15	5,049	15	83,117	Baik	A
18.	WAJO	14,126	20	13,966	15	4,871	15	82,963	Baik	A
19.	BIREUEN	13,655	19,655	15	15	4,409	15	82,72	Baik	A
20.	TULUNGAGUNG	12,226	19,828	15	15	5,595	15	82,649	Baik	A

4. Hasil Penilaian terhadap Reformasi Birokrasi BPKPD meraih peringkat ke-3 (ketiga) tingkat Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai sebesar 87,52 kategori “A” predikat Sangat Baik.

No	Perangkat Daerah	SELF ASSESSMENT			NILAI VERIFIKASI		
		RB GENERAL	RB TEMATIK	NILAI RB PD	RB GENERAL	RB TEMATIK	NILAI RB PD
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	57,00	33,00	90,00	56,91	32,19	89,10
2	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	55,07	33,00	88,07	55,37	32,50	87,87
3	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	54,78	32,03	86,81	55,62	31,89	87,52
4	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53,80	32,25	86,05	53,00	32,50	85,50
5	Sekretariat Daerah	52,90	26,28	79,17	52,79	32,47	85,26
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	52,13	31,33	83,46	51,82	31,60	83,42
7	Inspektorat Daerah	52,78	27,33	80,11	52,41	31,00	83,41
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51,84	31,29	83,13	50,80	32,47	83,27
9	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	47,09	32,27	79,36	47,00	31,87	78,88
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	48,86	31,75	80,61	49,10	28,39	77,49
11	Dinas Kesehatan	45,56	24,18	69,74	48,08	29,09	77,17
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	49,50	32,40	81,90	47,52	28,85	76,37
13	Satuan Polisi Pamong Praja	52,92	33,00	85,92	48,83	26,60	75,43
14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	52,24	32,64	84,88	43,49	30,50	73,99
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41,02	29,37	70,40	48,29	25,57	73,86
16	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak	46,13	32,65	78,78	41,43	29,23	70,66
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50,38	31,00	81,38	39,75	27,65	67,40



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. RONI A SAHRONI, M.M**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SUGIANTO**
Jabatan : **BUPATI TASIKMALAYA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, Desember 2024

Pihak Kedua


ADE SUGIANTO

Pihak Pertama



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 19681008 198803 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,25
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	86%
4	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	5,18%

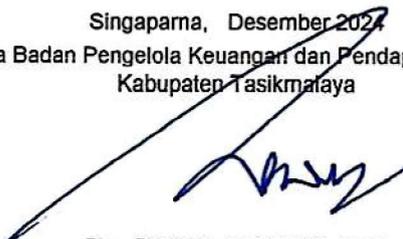
No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.242.098.246,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	701.350.456.448,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.852.100,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.525.061.000,00

BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO

Singaparna, Desember 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,25	87,52	111,85%
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	86%	82,95%	96,45%
4	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	5,18%	6,23%	120,27%

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.242.098.246,00	28.345.187.797,00	93,73%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	701.350.456.448,00	693.603.902.309,00	98,90%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.852.100,00	955.508.449,00	99,86%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.525.061.000,00	4.302.000.388,00	95,07%

Singaparna, Desember 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya


Drs. RONI A. SAHRONI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003